



Negara Neoliberal, Pembangunan Pariwisata dan Persoalan Kemiskinan di Manggarai Barat, Flores, NTT, Indonesia Timur

Emilianus Yakob Sese Tolo¹; Maximus Manu²; Philipus Ola Daen³

1 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia

2 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia

3 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere 86152, Flores, NTT, Indonesia

Pos-el: emilianustolo@yahoo.com, moatmaximus@gmail.com

Diajukan: 13 Januari 2023; **Direview:** 27 April 2023; **Diterima:** 02 Mei 2023; **Dipublis:** 22 Juni 2023.

DOI: DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.345.102-129>

Abstract: *Neoliberal state policies in many developing countries have led to poverty, environmental problems, and economic inequalities. This article aims to explain the process and mechanism of tourism development in the neoliberal Indonesian state and its impacts on the people of West Manggarai. This research used a qualitative methodology through observation, in-depth interviews and focused group discussions (FGDs). This study argues that tourism development in West Manggarai has been shaped by the intervention of the Indonesian neoliberal state, which tends to side with capital that promotes economic growth. Tourism development in West Manggarai has thus resulted in corruption for the sake of capital accumulation and economic growth. This neoliberal development model has caused poverty, environmental problems, and increased economic inequalities in West Manggarai. However, these negative impacts of tourism development have not yet triggered systematic and progressive civil society movements in West Manggarai. This paper recommends that tourism development in West Manggarai should be carried out in a decentralized manner by emphasizing on the constructive collaboration between different parties, such as local communities, local government, and the central government. The collaboration should be based on the understanding that there is an inseparable relationship between the tourism sector and other sectors, such as agriculture, fisheries, cooperatives, and education.*

Keywords: *tourism development, neoliberal state, poverty, civil society movements*

Pendahuluan

Ketika mengunjungi Labuan Bajo pada 23 Desember 2019, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, mengingatkan demikian: “Jangan sampai nanti wisatawan banyak, tapi rakyatnya tidak menikmati apa-apa. Kami tidak ingin orang bicara Labuan Bajo di mana-mana bahkan di tingkat mancanegara, tapi masyarakatnya masih banyak yang prasejahtera. Ke depan, kemiskinan di Labuan Bajo, di Manggarai Barat harus dikikis habis.”¹ Tetapi, pada kesempatan ini juga, Menteri Sosial yakin bahwa industri pariwisata di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo dan TNK, dapat mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan ekonomi politik. Sebab, “[s]emakin banyak wisatawan datang, akan semakin mampu mensejahterakan rakyatnya.”² Keyakinan Menteri Sosial ini adalah keyakinan negara

¹ Mufarida, Binti, “Wisata Labuan Bajo Berpotensi Menurunkan Kemiskinan,” *SindoNews*, 26 Desember 2019, <https://nasional.sindonews.com/berita/1480057/15/wisata-labuan-bajo-berpotensi-turunkan-kemiskinan> (diakses 5 Mei 2021).

² *Ibid.*

neoliberal Indonesia bahwa pembangunan pariwisata neoliberal di Manggarai Barat akan berdampak bagi penurunan kemiskinan dan menghapus kesenjangan ekonomi politik di Labuan Bajo. Perhatian utama negara neoliberal Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diyakini dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, kebijakan negara neoliberal di Indonesia telah menciptakan kesenjangan dalam masyarakat Indonesia. Di tahun 2010, rata-rata kekayaan bersih (net worth) dari 40 oligark terkaya di Indonesia mencapai 630.000 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, walaupun oligark ini jumlahnya kurang dari 2/1.000.0000 dari total populasi di Indonesia, mereka menguasai aset ekonomi 10% dari total PDB Indonesia dan memiliki aset finansial 1.222 kali dari pendapatan tahunan rata-rata orang Indonesia. Satu dekade kemudian, pada 2020, ketimpangan sosio-ekonomi menjadi relatif tinggi —yang ditunjukkan oleh *gini ratio* 0,401 pada Maret 2021— sebagai akibat semakin menghegemoniknya sistem ekonomi kapitalis neoliberal.

Secara khusus, kebijakan negara neoliberal dalam bidang pariwisata di Manggarai Barat juga telah menciptakan kesenjangan ekonomi. Di tahun 2018, *gini ratio* di Manggarai Barat adalah 0,295, yang akhirnya naik drastis menjadi 0,367 pada tahun 2020 di tengah upaya negara neoliberal Indonesia mempromosikan pembangunan pariwisata, termasuk wisata premium atau wisata super prioritas. Ini berarti bahwa pada tahun 2020, 1% orang di Kabupaten Manggarai Barat menguasai 36% total kekayaan di Manggarai Barat di tahun 2020. Padahal, ketimpangan ini terjadi tepat ketika ekonomi Indonesia umumnya dan Manggarai Barat khususnya sedang lesu akibat pandemik Covid-19, yang menghantam industri pariwisata di Indonesia, termasuk Manggarai Barat. Karena itu, pada situasi normal, tanpa pandemi Covid-19, kesenjangan ekonomi di Manggarai Barat akan lebih tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya akumulasi kapital pada pelaku pariwisata, terutama para investor yang pada umumnya berasal dari Makassar, Lombok, Bali, Jawa, Sumatra, dan bahkan luar negeri.

Namun, walaupun persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Manggarai Barat dalam dua dekade terakhir semakin meningkat di tengah upaya pemerintah mengembangkan sektor pariwisata, studi tentang dampak pembangunan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Manggarai Barat belum banyak dilakukan secara serius. Erb memang sudah melakukan penelitian untuk menganalisa persoalan pembangunan dan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sejauh ini. Dalam penelitiannya, Erb cenderung menyalahkan manajemen dan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Karena itu, walaupun penelitian Erb berkontribusi signifikan terhadap pembacaan terhadap perkembangan pariwisata dan kemiskinan di Labuan Bajo, analisis yang dilakukan Erb tidak dapat membaca proses dan mekanisme terjadinya proses pemiskinan yang terjadi secara langsung dan nyata di lapangan, terutama berkaitan dengan bagaimana negara neoliberal Indonesia dalam relasinya dengan pemerintah daerah Manggarai Barat dan para investor membentuk lanskap pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Apalagi penelitian Erb terjadi sebelum pemerintah neoliberal Indonesia secara serius mengintervensi pembangunan pariwisata super-prioritas dan super-premium, yang baru terjadi sejak 2015.

Berangkat dari keterbatasan Erb dan kekosongan literatur yang membahas persoalan pembangunan pariwisata super prioritas dan super premium di Manggarai Barat ini, artikel ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian ini dengan menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana peran negara neoliberal Indonesia dalam membentuk pola pembangunan pariwisata yang kapitalistik di

Manggarai Barat? Kedua, bagaimana proses dan mekanisme pembangunan pariwisata meningkatkan persoalan kemiskinan di Labuan Bajo hari ini? Ketiga, bagaimana peran civil society dalam merespons pembangunan pariwisata di Manggarai Barat? Menjawab tiga pertanyaan ini, kami berargumentasi bahwa pembangunan pariwisata di Manggarai Barat telah meningkatkan kemiskinan, polusi (kerusakan lingkungan), dan kesenjangan ekonomi. Kemiskinan, polusi (kerusakan lingkungan), dan kesenjangan ekonomi itu disebabkan oleh kebijakan negara neoliberal yang menyebabkan terjadinya sentralisasi pengelolaan dan pengembangan pariwisata, kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-kapital dan korupsi yang merajalela. Tetapi, di tengah kemiskinan, polusi (kerusakan lingkungan) dan kesenjangan ekonomi, gerakan perlawanan civil society mengalami involusi sebagai akibat dari ketiadaan organisasi atau *civil society* yang kuat di Manggarai Barat, termasuk organisasi keagamaan seperti Gereja Katolik.

Menggunakan data lapangan dari Labuan Bajo, Flores, NTT, Indonesia Timur, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan negara neoliberal Indonesia terhadap formasi pembangunan pariwisata dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Artikel ini terdiri atas enam bagian. Setelah introduksi, artikel ini akan memberikan penjelasan teoretis tentang negara neoliberal, pariwisata, dan pembangunan. Metodologi akan diuraikan pada bagian ketiga. Penjelasan tentang proses dan mekanisme pembangunan pariwisata ala negara neoliberal Indonesia di Manggarai Barat akan dijelaskan pada bagian empat. Pada bagian lima, tulisan ini akan membahas dampak pembangunan pariwisata ala negara neoliberal dan gerakan perlawanan dari aktor-aktor civil society di Manggarai Barat. Tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan singkat.

Negara Neoliberal, Pariwisata, dan Pembangunan

Untuk memahami peran negara dalam pembangunan pariwisata, maka perlu dipahami terlebih dahulu hakikat negara. Sudah sejak jaman Yunani Kuno, upaya untuk memahami watak negara sudah digeluti oleh para filsuf Yunani. Bagi Plato, misalnya, negara harus memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak dari negara ini harus didasarkan pada “nilai-nilai moral yang rasional” agar dapat mencegah warga negara “menjadi liar dan tak terkendali.”³ Karena itu, dalam negara seperti ini, yang paling layak memimpin hanyalah filsuf-raja, yang menjadikan akal (*rasio*) menjadi penggerak kekuasaan yang tidak mementingkan individu atau kelompok tertentu, tetapi harus berlaku adil dan bijaksana untuk seluruh warga negara. Di sini, negara adalah instrumen di tangan filsuf-raja untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Sebaliknya, Hegel berpendapat bahwa negara adalah penjelmaan dari ide universal dan, karena itu, “...negara merupakan lembaga yang memiliki kemauannya sendiri yang mandiri. Dia bukan sekedar alat dari sekelompok orang di dalam masyarakat, atau gabungan dari keinginan-keinginan kelompok yang ada di masyarakat.” Misi negara adalah “menciptakan masyarakat yang lebih baik.”⁴ Berbeda dengan Plato, bagi Hegel, negara bukanlah instrumen siapa-siapa, termasuk pemimpin filsuf-raja ala Plato. Hegel berpendapat bahwa “...negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya. Dia merupakan alat dari dirinya sendiri.”⁵ Berbeda dari Hegel, menurut kaum pluralis, “...negara merupakan alat dari semua masyarakat.” Karena itu, “[p]olitikus yang bisa membuat sebuah formula di mana kepentingan sebagian besar masyarakat terpenuhi, dialah yang akan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara.

³A. Budiman, *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi* (Jakarta: PT Gramedia, 1996), hlm. 6.

⁴*Ibid.*, hlm. 17.

⁵*Ibid.*, hlm. 56.

Dialah yang menjadi dominan, karena bisa mengkompromikan berbagai kepentingan kelompok yang ada di masyarakat.”⁶

Sebaliknya, dari kacamata Marxis, negara merupakan alat dari kelas dominan, yakni “kaum borjuis dalam sistem kapitalis, kaum bangsawan dalam sistem feodal, kaum buruh dalam sistem sosialis.”⁷ Dengan pandangan seperti ini, kaum Marxist cenderung untuk tidak mendalami teori kekuasaan dan negara. Sebab, karena determinisme ekonomi, mereka yakin bahwa watak negara sangat bergantung pada relasi sosial produksi dalam masyarakat. Menurut para pendukung teori Marxis, janji bahwa kepentingan umum akan dilayani oleh negara tidak pernah terjadi, karena konflik kelas, kepentingan dominan dari kelas-kelas terkemuka akan diprioritaskan oleh negara. Namun, “negara berusaha menyembunyikan tindakannya demi kepentingan kelas dominan agar kekuasaannya mendapat legitimasi dari rakyatnya,” yang disebut *hegemoni* oleh Gramsci.⁸

Berdasarkan padangan ekonomi politik Marxis, negara adalah sebuah relasi (*relation*). Negara sebagai sebuah relasi, dalam perspektif Marxis, menurut Hanieh, “bukan sebuah ‘benda’ atau kumpulan individu sebagai aktor sosial, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah ekspresi dari kekuasaan kelas yang partikular —yang mana kekuasaan kelas dimengerti sebagai sebuah himpunan relasi sosial yang terus menerus berada dalam proses perealisasi diri (*the process of coming-into-being*). Dari perspektif ini, negara bukanlah medan politik tersendiri, yang terpisah dari medan ekonomi.”⁹ Karena itu, negara adalah medan di mana kekuasaan politik dan ekonomi bersenyawa yang merupakan akibat dari relasi sosial produksi tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, corak relasi sosial produksi dalam masyarakat akan menentukan seperti apa watak sebuah negara. Negara neoliberal Indonesia hari ini, misalnya, merupakan akibat dari relasi kelas sosial dalam masyarakat Indonesia yang terbentuk melalui proses pertarungan kelas sejak lama, terutama sejak pembantaian 1965, yang tentunya memiliki kaitan erat dengan relasi kelas dalam skala global yang memiliki kepentingan untuk membentuk negara neoliberal untuk kepentingan kelas kapitalis, seperti yang dimaksudkan Harvey.¹⁰

Negara neoliberal memainkan peran penting dalam menentukan pengembangan pariwisata di negara berkembang hari ini. Pembangunan pariwisata di Indonesia mulai digencarkan seiring dengan ambisi pemerintah pusat meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata, yang pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an ditopang oleh sektor perminyakan. Sembari membenahi sektor pariwisata, karena ketiadaan modal yang cukup untuk pembangunan, negara Indonesia, yang pada tahun 1970-an menjalankan agenda negara pembangunan, harus secara bertahap mengikuti penyesuaian neoliberal untuk kepentingan akumulasi pada tataran global, termasuk dalam sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia menjadikan pariwisata sebagai jalan keluarnya akibat persoalan jatuhnya harga minyak ini.¹¹ Pengembangan pariwisata digencarkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan fokus perhatian yang

⁶*Ibid.*, hlm. 57-58.

⁷*Ibid.*, hlm. 56.

⁸A. Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks* (New York: International Publisher, 1971).

⁹A. Hanie, “Thinking About Capital and Class In The Gulf Arab States,” dalam Alessandra Mezzadri (ed.), *Marx In The Field* (New York: Anthem Press, 2021), hlm. 81.

¹⁰D. Harvey, *The New Imperialism* (New York: Oxford University Press, 2003); D. Harvey, *A brief History of Neoliberalism* (New York: Oxford University Press, 2005).

¹¹Maribeth Erb, “Understanding Tourists: Interpretations From Indonesia.”

lebih besar pada pengembangan dan kemajuan pariwisata di Bali.¹² Pariwisata di Indonesia, terutama Bali, berkembang pesat dan, karena itu, menarik banyak wisata manca negara dan domestik ke Indonesia, terutama ke Bali.¹³ Kedatangan para wisatawan ini tentu memberi keuntungan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan ini, hingga hari ini, pemerintah Indonesia ingin menciptakan “Bali baru” di tempat lain di Indonesia, termasuk di Labuan Bajo, Flores.¹⁴

Dalam kaitannya dengan tanah, kebijakan neoliberal adalah mempromosi privatisasi tanah dan kepemilikan tanah secara individual. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa privatisasi dan kepemilikan individual dapat meningkatkan produktivitas pada sektor agraria dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.¹⁵ Bank Dunia terus mempromosikan kebijakan ini dan mendorong pemercepatan kepemilikan privat tanah dan peningkatan pasar tanah serta akses terhadap kredit. Kepemilikan privat membantu masyarakat mengakses kredit. Karena itu, sejak 1994, Bank Dunia sudah terlibat aktif dalam mempromosikan program sertifikasi tanah di Indonesia.

Dalam operasionalisasinya, negara neoliberal bertumpu pada ideologi neoliberal “yang merayakan pasar, kewirausahaan, kepemilikan privat dan *rule of law*, sembari mengabaikan relasi kuasa yang ada dalam masyarakat yang memproduksi kemiskinan dan memberi kesempatan kepada mereka yang berkuasa memutarbalikan *role of law* atau pengimplementasian hukum secara selektif demi kepentingan kelas yang berkuasa.”¹⁶ Akibatnya, pergeseran dari pembangunan yang dipimpin oleh negara (*negara pembangunan*) ke negara neoliberal telah menyebabkan kemiskinan di banyak tempat di dunia karena negara neoliberal cenderung memihak kelas dominan, yaitu kelas kapitalis.¹⁷ Dengan narasi kebijakan dan kerangka kerja untuk memberantas kemiskinan, negara dengan aliansinya, para investor, mendapatkan akses ke tanah dan sumber daya alam di pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan ekonomi, termasuk pengembangan ekonomi pariwisata. Misalnya, di Indonesia, wilayah hutan pemerintah bisa diturunkan statusnya melalui kebijakan keputusan tertentu (*decree of release*) sebagai ‘areal penggunaan lain’ (*non-forest areas*) dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup demi kepentingan kapital kelapa sawit di Kalimantan.¹⁸ Dalam hal ini, baik dalam negara pembangunan maupun negara neoliberal, penetrasi kapitalisme di berbagai tempat kerap kali dibantu oleh negara.¹⁹ Semua proses ini memiliki dampak yang mendua: selain membawa manfaat bagi satu pihak, hal itu juga membawa kemiskinan ke pihak lain.²⁰

¹²M. Picard, “Cultural Tourism, Nation-Building And Regional Culture: The Making Of A Balinese Identity,” dalam M. Picard & R. E. Wood, eds. *Tourism, Ethnicity And The State In Asian And Pacific Societies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997).

¹³*Ibid.*

¹⁴Emilianus Yakob Sese Tolo (2019), “Weighing Jokowi’s Infrastructure Projects in Eastern Indonesia,” diakses 11 Oktober 2019 (<https://www.newmandala.org/weighing-jokowis-infrastructure-projects-ineastern-indonesia/>); Emilianus Yakob Sese Tolo (2019), “Proyek Infrastruktur di Flores: Hanya Memakmurkan yang Kaya?,” diakses 11 Oktober 2019 (<https://tirto.id/proyek-infrastruktur-di-flores-hanya-memakmurkan-yangkaya-dhsG>).

¹⁵C.J. Fortin, “The Biofuel Boom and Indonesia’s Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan.” Makalah ini dipresentasikan di *the International Conference on Global Land Grabbing*, University of Sussex, UK 6-8 April 2011.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷J. F. McCarthy dan R. A. Cramb, “Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers.” *Geographical Journal*, 175(2) (2009), hlm. 112-123.

¹⁸R. De Vos, M. Köhne dan D. Roth, ““We’ll turn your water into Coca-Cola”: The atomizing practices of oil palm plantation development in Indonesia.” *Journal of Agrarian Change*, 18(2) (2011), hlm. 390.

¹⁹M. Habibi, “Capitalist Agrarian Change in Indonesia: Class, Production and Reproduction”. Disertasi Doktoral, Development Studies, SOAS University of London, 2020.

²⁰H. Bernstein, *Class Dynamics of Agrarian Change* (Canada: Fernwood Publishing, 2010).

Peran negara neoliberal dalam pengembangan pariwisata sangat krusial. Hal ini disebabkan karena negara menghasilkan kebijakan yang menentukan dinamika pengembangan pariwisata. Sehubungan dengan pengembangan negara, termasuk pengembangan pariwisata, negara menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk pengembangan kapitalisme pariwisata dengan melakukan, seperti apa yang Harvey²¹ sebut sebagai *akumulasi melalui perampasan*. Akumulasi melalui perampasan “memerlukan pendekatan yang mengandalkan kekuatan negara dalam melakukan *akumulasi melalui perampasan*.”²² Melalui privatisasi dan liberalisasi pasar, peran negara diarahkan untuk “merampas kekayaan publik. Aset yang dipegang oleh negara dilepaskan ke pasar di mana surplus modal dapat diinvestasikan.”²³ Atau, seperti yang ditulis Fortin, kapitalisme neoliberal hari ini “terus mengandalkan pada kekerasan, penipuan, dan perampasan terhadap sumber-sumber kekayaan dan akumulasi kapital.”²⁴ Dengan cara demikian, maka aset publik, seperti tanah misalnya, bisa dengan mudah berpindah ke pemilik modal dan kekuasaan. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang, perampasan tanah marak terjadi. Negara dan korporasi berkali-kali merampas tanah massa rakyat untuk pengembangan pariwisata.²⁵ Perampasan tanah ini tidak jarang melibatkan berbagai pemangku kepentingan elit tradisional, pemerintah dan investor. Peluso dan Lund²⁶ berpendapat bahwa dengan bantuan negara dan pemangku kepentingan lainnya penguasaan lahan hari ini terkonsentrasi pada kaum bermodal yang diperoleh melalui kekerasan, legalisasi, dan teritorialisasi yang melibatkan negara. Lebih lanjut, Peluso dan Lund²⁷ menunjukkan bahwa perampasan tanah dilakukan dengan dalil melindungi area tertentu, seperti perlindungan lingkungan, tetapi sejatinya untuk mendorong akumulasi kapital para pemilik modal. Perampasan tanah ini juga kerap berkaitan dengan pengembangan pariwisata.²⁸

Dalam negara neoliberal yang menomorsatukan kelas kapitalis ini, korupsi menjadi hal yang lumrah. Hal ini bisa dilihat dalam negara neoliberal Indonesia. Korting atau remisi hukuman oleh lembaga pengadilan bagi koruptor marak terjadi di Indonesia hari ini, yang bisa mencapai 60%. Di pengadilan tinggi Jakarta, misalnya, Jaksa Pinangki dipotong masa tahanannya dari 10 menjadi 4 tahun dan Djoko Tjandra dipotong masa tahanannya menjadi 3,5 tahun saja. Selain itu, Julari Batubara, mantan Menteri Sosial, yang di awal tulisan ini mengharapkan Manggarai Barat akan keluar dari kemiskinan melalui pembangunan pariwisata, menilep dana bansos untuk pandemi Covid-19 dan dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK, yang sebelumnya berambisi untuk memberikan hukuman mati untuk koruptor bansos Covid-19. Sialnya, Akil Mochtar dipenjara seumur hidup akibat terlibat dalam suap pemilu kepala daerah, tetapi yang mencuri uang rakyat di masa pandemi Covid-19 hanya

²¹D. Harvey, “*The New Imperialism*.”

²²*Ibid.*, hlm. 156.

²³*Ibid.*, hlm. 158.

²⁴C.J. Fortin, “The Biofuel Boom and Indonesia’s Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan,” hlm. 23.

²⁵J. F. McCarthy, J. A. Vel, dan S. Afiff, “Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia’s Outer Islands.” *Journal of Peasant Studies*, 39(2) (2012), hlm. 521-549.

²⁶N. L. Peluso dan C. Lund, “New frontiers of land control: Introduction.” *Journal of Peasant Studies*, 38(4) (2011), hlm. 667-681.

²⁷*Ibid.*

²⁸Emilianus Yakob Sese Tolo, “Proyek Infrastruktur di Flores: Hanya Memakmurkan yang Kaya?”

dipenjara 11 tahun.²⁹ Politik korting hukuman ini, termasuk untuk para koruptor, pada tanggal 30 September 2021, didukung oleh Mahkamah Konstitusi, yang disampaikan oleh Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.³⁰ Manipulasi semacam ini menjadi hal lumrah yang kadang cepat hilang dari diskursus kritis publik. Sebab, hampir semua oligark media di Indonesia hari ini dikuasai oleh golongan 1% ini, yang menggunakan media untuk meraup keuntungan ekonomi dan politiknya, termasuk dalam menggiring opini publik untuk menutup kasus-kasus korupsi di Indonesia yang merugikan dirinya dan kroni-kroninya.³¹ Akibatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia pun tak bisa bersikap kritis, selain karena kemiskinannya sehingga tidak mendapat akses terhadap pendidikan yang memadai untuk bersikap kritis, tetapi juga karena hegemonisasi media dan teror pemimpin politik, aparat, dan preman bayaran.

Pada ranah ranah birokrasi negara neoliberal, korupsi juga adalah persoalan runyam yang tak bisa dihindarkan. Pada 2009, survei dari *Global Corruption Barometer* menunjukkan lembaga birokrasi merupakan lembaga ketiga terkorup di Indonesia setelah lembaga legislatif dan yudikatif. Sepuluh tahun kemudian, pada 2019, berdasarkan survei dari *Transparency International Indonesia*, lembaga birokrasi daerah dan pusat masih menjadi lembaga terkorup kedua dan ketiga setelah lembaga legislatif. Dalam survei ini, 3 dari 10 responden mengaku pernah membayar suap untuk mendapatkan layanan publik di Indonesia, yang membuat Indonesia menjadi negara ketiga dengan kasus suap tertinggi di antara 17 negara Asia yang disurvei. Menurut *Indonesian Corruption Watch 2020*, berdasarkan temuan kasus korupsi terbanyak, lembaga birokrasi kabupaten menjadi yang terkorup dengan 95 kasus, yang merugikan negara sebesar 6,1 triliun rupiah. Sejauh ini, tidak jarang golongan 1% dan sekutunya juga mendikte kekuatan lembaga birokrasi untuk kepentingan politik mereka. Apalagi, di Indonesia, lembaga birokrasi ditempatkan di bawah lembaga politik yang dikuasai oleh golongan pebisnis dan pengusaha yang merupakan bagian dari golongan 1%.³² Hal ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan relasi kekuasaan antara lembaga politik dan lembaga birokrasi, yang menimbulkan meritokrasi birokrasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jalan. Apalagi sudah sejak lama, lembaga politik terutama lembaga legislatif yang dikuasai oleh pebisnis yang merupakan golongan 1% (318 orang atau 55% di DPR RI, misalnya) adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Menurut Miftah Thoha, di Indonesia, "...semua parpol sangat dimungkinkan ikut memengaruhi ASN, padahal seharusnya menurut meritokrasi tidak diperbolehkan."³³ Dalam konteks dominasi lembaga politik terhadap lembaga birokrasi seperti ini, korupsi (kolusi dan nepotisme) menjadi praktik yang disepakati secara berjemaah di lembaga birokrasi karena "banyak terjadi satu kantor ditempati sanak famili, agama yang sama, bahkan pendukung parpolnya."³⁴

²⁹Narasi Najwa Shihab, 2 Agustus 2021.

³⁰Dani Prabowo, "MK: Sejatinya Hak Mendapatkan Remisi Harus Diberikan Tanpa Terkecuali", diakses pada 1 Oktober 2021 dari https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/17121751/mk-sejatinya-hak-mendapatkan-remisi-harus-diberikan-tanpa-terkecuali?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Mobile.

³¹R. Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia, Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital* (Jakarta: Marjin Kiri, 2018).

³²Berdasarkan riset Marepus Corner yang bertajuk "Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia" menunjukkan bahwa dari total 575 anggota DPR RI terdapat 318 pebisnis. Dari 318 pebisnis ini, terdapat 116 afiliasi para pebisnis ini yang berhubungan dengan oligarki besar di Indonesia seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh.

³³M. Thoha, "Tinjauan Dan Implementasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(3) (2020), hlm. 75-85.

³⁴*Ibid.*

Karena ketimpangan ekonomi dan korupsi dalam bidang politik dan birokrasi dalam negara neoliberal Indonesia, negara yang sejatinya memainkan peran penting dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan pariwisata, untuk memberantas kemiskinan tidak dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Di Flores, misalnya, seperti yang ditulis oleh Dale³⁵ dan Erb,³⁶ pengembangan pariwisata telah berdampak bagi pemiskinan masyarakat akibat korupsi, perampasan tanah, dan pemagaran akses terhadap sumber daya ekonomi masyarakat demi kepentingan akumulasi kapital bagi investor asing dan domestik. Karena itu, pembangunan pariwisata di Flores, terutama Labuan Bajo, lebih menguntungkan pihak luar, yakni kapitalis asing dari berbagai manca negara dan kapitalis domestik dari Sulawesi, Bali, Jawa, dan Sumatra.

Namun, tidak saja itu, penetrasi kapitalisme, termasuk kapitalisme pariwisata, dalam negara neoliberal Indonesia juga telah menciptakan diferensiasi kelas di tengah komunitas petani dan nelayan di tempat di mana pembangunan pariwisata dilaksanakan sebagai akibat hubungan produksi kapitalis neoliberal, yakni kelas kapitalis, *petty commodity producers* (PCPs), dan kelas-kelas pekerja (*classes of labour*), yang, sayangnya, tidak dielaborasi secara lebih detail dalam tulisan ini akibat singkatnya waktu penelitian dan keterbatasan dana.³⁷ Sebab, hubungan produksi pariwisata, sebagaimana halnya di sektor agraria, di negara-negara berkembang ditentukan oleh empat input industri pariwisata utama: kontrol atas tanah, akses ke modal atau kredit, akses ke tenaga kerja, dan penggunaan teknologi.³⁸ Akses terhadap empat input industri pariwisata ini sangat bergantung juga pada kebijakan pemerintah atau negara neoliberal. Hambatan dalam akses terhadap input industri pariwisata ini, baik melalui proses 'ekonomi' dan 'ekstra-ekonomi', menghasilkan proletarisasi petani kecil dan nelayan kecil.³⁹ Modal ekonomi dengan demikian terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan banyak petani dan nelayan kecil yang akan menjadi migran, buruh tani pertanian, buruh kapal, buruh hotel dan pedagang kecil.⁴⁰ Dalam konteks pengkonsentrasian modal di tangan segelintir orang ini, diferensiasi kelas dan proses pemiskinan akan semakin intensif, yang akan berakibat pada meningkatnya tingkat kemiskinan di tengah kemajuan pesat industri pariwisata, sebagaimana yang sedang terjadi di Bali dan Labuan Bajo.⁴¹

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses dan mekanisme pembangunan pariwisata dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat, Flores, NTT, Indonesia Timur, dengan studi kasus di Kota Labuan Bajo dan Desa Komodo. Untuk mehamami proses dan mekanisme

³⁵C.J.P. Dale, *Kuasa, Pembangunan, Dan Pemiskinan Sistemik* (Kupang: Sunspirit Books, 2013).

³⁶Maribeth Erb, "Understanding Tourists: Interpretations From Indonesia"; Maribeth Erb, "Shaping A 'New Manggarai': Struggles Over Culture And Tradition In An Eastern Indonesian Regency"; Maribeth Erb, "Limiting Tourism And The Limits Of Tourism: The Production And Consumption Of Tourist Attractions In Western Flores"; Maribeth Erb, "Tourism As Glitter Re-Examining Domestic Tourism in Indonesia."

³⁷H. Bernstein, "Class Dynamics of Agrarian Change."

³⁸J. Pincus, "Approaches to the political economy of agrarian change in Java." *Journal of Contemporary Asia*, 20 (1) (1990), hlm. 3-40; Q. F. Zhang, "Class differentiation in rural China: Dynamics of accumulation, commodification and state intervention." *Journal of Agrarian Change*, 15(3) (2015), hlm. 338-365.

³⁹D. Hall, "Primitive accumulation, accumulation by dispossession and the global land grab," *Third World Quarterly*, 34(9) (2013), hlm. 1582-1604.

⁴⁰C.J.P. Dale, "Kuasa, Pembangunan, Dan Pemiskinan Sistemik."

⁴¹M. Picard, "Cultural Tourism, Nation-Building And Regional Culture: The Making Of A Balinese Identity;" C.J.P. Dale, "Kuasa, Pembangunan, Dan Pemiskinan Sistemik."

pembangunan, pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang lebih tepat karena studi kasus dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada peneliti untuk mengeksplor kompleksitas dan kedalaman mekanisme fakta sosial pada lokasi penelitian tertentu.⁴² Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus. Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu di Labuan Bajo dan pulau Komodo dari tanggal 21 Juni 2021 sampai 27 Juni 2021. Selain peneliti utama, penelitian ini melibatkan 4 asisten lokal bergelar Sarjana Filsafat, yang adalah alumni STFK Ledalero. Namun, dari 4 asisten lokal yang digaji untuk mengumpulkan data ini, hanya 2 asisten lokal yang efektif mengumpulkan data. Sementara itu, 2 asisten lokal yang lain tidak serius mengumpulkan data, yang menyebabkan banyak data yang direncanakan untuk dikumpulkan gagal diperoleh oleh penulis. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Labuan Bajo dan Desa Komodo, institusi yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan metode *snowballing* dengan cara mencari informan-informan kunci untuk diwawancarai dari informan terdahulu. Karena peneliti cukup asing dengan wilayah penelitian, maka peneliti sangat bergantung pada rekomendasi dari informan yang dijumpai dalam mencari informan lain dalam penelitian. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yang berfungsi untuk memvalidasi informasi dari para responden untuk menemukan data paling otentik dan obyektif. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, instrumen pengumpulan data adalah wawancara mendalam, *focused group discussions* (FDGs), dan observasi.

Jumlah wawancara yang dilakukan sebanyak 36 orang dan 5 FDGs, yang mencakup masyarakat biasa, pengusaha, pedagang, pekerja pariwisata, polisi, birokrat, politisi kabupaten dan desa Komodo, akademisi, tokoh *civil society*, dan rohaniwan. Namun, dari 36 wawancara ini, hanya setelah ½ dari total jumlah wawancara yang layak digunakan untuk menulis artikel ini sebagai akibat dari 2 asisten lokal tidak menjalankan tugasnya dengan serius dan tanggung jawab. Penulis tidak bisa melakukan penelitian tambahan untuk melengkapi kekurangan yang disebabkan oleh 2 asisten lokal akibat kekurangan dana dan berkesulitan untuk mencari waktu yang tepat. Dalam penelitian ini, untuk kepentingan observasi lapangan, salah seorang peneliti tinggal selama dua hari di kampung Komodo di Desa Komodo dan penelitian yang lain tinggal di kota Labuan Bajo selama seminggu. Para peneliti membaca literatur dan dokumentasi, baik dari koran, jurnal ilmiah, buku, maupun dokumen resmi dari pemerintah untuk melengkapi data lapangan yang telah peneliti kumpulkan dalam penelitian ini.

Negara Neoliberal dan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Manggarai Barat

Sentralisasi Pembangunan Pariwisata Negara Neoliberal

Pembangunan pariwisata di Manggarai Barat sangat sentralistik di bawah pemerintahan neoliberal Indonesia hari ini. Sentralisasi pembangunan pariwisata itu ditunjukkan melalui intervensi pemerintah pusat yang begitu kuat dalam kaitannya dengan dengan alokasi dan perencanaan anggaran, perencanaan tata ruang, perizinan, penempatan wakil pusat di daerah, dan sentralisasi akumulasi profit. Sentralisasi yang dilakukan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisir membuat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kurang harmonis. Menurut wakil ketua DPRD

⁴²J. Gerring, *Case study research: Principles and Practices* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Manggarai Barat, Marsel Jeramun, institusi-institusi yang ditempatkan pemerintah pusat di daerah, seperti Badan Operasi Pariwisata (BOP), sudah “mengganggu pemerintah daerah yang otonom.”⁴³ Karena itu, tidak jarang, sering terjadi tumpang tindih tata kelola dan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyebabkan pembangunan pariwisata kurang memiliki dampak yang serius bagi pembangunan daerah.

Perencanaan dan pengalokasian anggaran diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengikuti patokan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sentralistis dalam upaya pengembangan pariwisata, maka pengalokasian dana tidak jarang lebih mementingkan instansi yang menjadi wakil pusat di daerah. Misalnya, dalam setahun, pada tahun 2020, anggaran pembangunan pariwisata untuk dinas pariwisata kabupaten Manggarai Barat hanya 17 miliar rupiah. Sementara itu, Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) mendapatkan alokasi dana dua kali lebih besar dari dari Dinas Pariwisata, yakni 38 miliar. Padahal, wilayah kerja Dinas Pariwisata lebih luas karena dengan dana yang dialokasikan itu, Dinas Pariwisata harus mengurus semua potensi pariwisata di Manggarai Barat, termasuk potensi pariwisata yang tersebar di desa-desa. Sementara itu, BTNK hanya memfokuskan pembangunan pariwisata di dalam Taman Nasional Komodo (TNK).

Sementara itu, wakil pemerintah pusat di daerah adalah Badan Otoritas Pariwisata (BOP). Karena TNK menjadi salah satu destinasi super prioritas dari total 5 destinasi super prioritas yang lain, pemerintah pusat menempatkan BOP di Labuan Bajo. Namun, walau ditempatkan di Labuan Bajo, wilayah kerja BOP mencakup 11 kabupaten. BOP memiliki alokasi anggaran besar. Alokasi anggaran untuk BOP menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat. Mengetahui anggaran dana BOP yang besar, masyarakat kadang-kadang memasukan proposal untuk mendapatkan bantuan dana untuk membangun usaha kecil menengah.

Dana dari pemerintah pusat ini, baik yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata, TNK maupun BOP, pada umumnya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur publik dan mengabaikan pembangunan manusia. Dinas Pariwisata memfokuskan pada pembangunan infrastruktur di luar TNK, terutama di darat. Sementara wilayah laut, terutama di dalam TNK, menjadi fokus perhatian dari BTNK. BOP juga berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, tetapi mayoritas usaha-usaha kecil dan menengah pariwisata di Labuan Bajo belum pernah mendapatkan sentuhan kegiatan pembangunan manusia yang dilaksanakan BOP. Namun, dengan dana yang besar untuk TNK dan BOP, berdasarkan pengamatan di lapangan, infrastruktur di dalam TNK tidak banyak berubah seperti 10 tahun lalu. Tidak banyak infrastruktur baru yang dibangun secara serius di TNK. Para pelaku usaha juga masih mengeluhkan belum banyak sentuhan dana dan pelatihan keterampilan, yang menjadi salah satu fokus BOP.

Tetapi, pembangunan infrastruktur di kota Labuan Bajo memang sudah banyak ditingkatkan, jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Labuan Bajo memiliki bandar udara Komodo yang baru dengan kualitas yang bagus. Pelabuhan Labuan Bajo sedang dibangun dan akan dibuat lebih lebar. Pemerintah juga membangun pelabuhan Multi Purpose. Jalan raya di kota Labuan Bajo sudah ditingkatkan kualitasnya serta dilengkapi dengan trotoar dan lampu jalan. Jalan raya dengan kualitas

⁴³ Wawancara di Labuan Bajo pada 22 Juni 2021.

yang baik juga dibangun ke destinasi wisata di sekitar kota Labuan Bajo. Walaupun dana pembangunan di kota Labuan Bajo ini tentu bukan berasal dari instansi-instansi yang menjadi wakil pusat di daerah, alokasi anggaran dana pembangunan ini merupakan kebijakan dan perencanaan pusat sesuai dengan perencanaan tata ruang yang juga ditetapkan dan dikendalikan dari pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan pariwisata di Manggarai Barat, terutama TNK.

Tujuan utama bagi pembangunan infrastruktur publik ini adalah untuk menarik investor dalam sektor pembangunan pariwisata. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, merupakan akibat dari keberadaan investor. Karena itu, lokasi strategis, seperti di daerah Bukit Silvia atau daerah menuju Nggorang, yang tidak berpenduduk, yang kepemilikan lahannya sudah jatuh pada tangan investor dari Jawa, Bali, dan Sumatra, sebagaimana bisa dilihat dari papan nama pemilik lahan di sepanjang jalan, pemerintah membangun jalan raya dengan kualitas yang sangat baik.

Pemberian izin terhadap investasi bagi para investor bagi pembangunan di Manggarai Barat merupakan wewenang pemerintah pusat, termasuk melalui instansi pusat yang ditempatkan di daerah, seperti TNK dan BOP. Pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi hanya memfasilitasi jika pemerintah pusat memberikan izin. Pemberian izin ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan usaha, tetapi juga dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh investor, seperti dermaga, merupakan wewenang dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki wewenang untuk mengatur lalu-lintas investasi, kecuali hanya untuk memfasilitasi investor yang sudah mendapat izin dari pemerintah pusat. Hal ini tidak jarang menimbulkan sikap antipati dari pemerintah daerah. Sebab, kebijakan pusat tidak selalu sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah dan juga tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan setempat dan bisa juga mengganggu ekosistem lingkungan, baik di dalam TNK maupun di luar wilayah TNK. Orientasi pemerintah pusat lebih tertuju pada investasi, yang diyakini akan membawa pertumbuhan ekonomi.

Dengan menempatkan wakil pusat di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengelola pembangunan pariwisata, pemerintah pusat dapat mengontrol langsung pendapatan dari sektor pariwisata di Manggarai Barat, terutama pendapatan dari sumber-sumber wisata di dalam TNK. Pendapatan dari TNK langsung masuk ke instansi BTNK, yang langsung berada di bawah kendali pusat. Pemerintah daerah cukup lama tidak mendapatkan pemasukan yang berarti dari TNK. Baru beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menempatkan personelnnya sendiri untuk memungut biaya retribusi sebesar Rp. 100.000,00 untuk wisatawan asing, Rp. 50.000,00 untuk wisatawan Nusantara, dan Rp. 20.000,00 untuk warga lokal. Sementara itu, pihak TNK menerima semua pemasukan lain berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.133/IV-SET/2014 tentang tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Dengan cara seperti ini, aset daerah, seperti TNK, menjadi domain kekuasaan pemerintah pusat dan, karena itu, pendapatan dari TNK tidak berimplikasi secara langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pada 2019, pendapatan untuk PDA Manggarai Barat dari TNK hanya berjumlah 6 miliar rupiah, sedangkan BTNK meraup pendapatan 34 miliar rupiah. Pada 2019, 39% PAD Manggarai Barat berasal dari sektor pariwisata secara keseluruhan.

Selain menempatkan instansi-instansi, seperti BTNK dan BOP, yang mengontrol secara langsung tata kelola pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, pemerintah pusat juga menempatkan BUMN untuk mengakumulasi modal dari pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Hotel plat merah seperti hotel Inaya dan bandara udara Komodo adalah aset pusat yang ditempatkan di daerah. Namun, karena intervensi pemerintah pusat yang sangat kuat terhadap pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, BUMN pemerintah ini kerap kali menunggak pembayaran pajak yang merupakan

bagian dari pendapatan utama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pada 2021, total tunggakan pajak dari BUMN sekitar 30 miliar rupiah. Hotel Inaya Bay menunggak sekitar 1,4 miliar rupiah. Pajak proyek bandara udara Komodo sekitar 10 miliar rupiah. Kebandelan perusahaan plat merah ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah Manggarai Barat. Walau PAD pada tahun 2019, PAD Manggarai Barat baru mencapai 180 miliar rupiah, pemerintah Manggarai Barat menargetkan PAD-nya untuk mencapai angka 1,3-2 triliun rupiah pada 2025.

Kontrol pemerintah pusat ini telah merugikan masyarakat dan pemerintah daerah Manggarai Barat. Yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah para investor dan pemerintah pusat. Para investor mendapatkan infrastruktur yang baik dan banyak kelunakan, termasuk kelunakan pajak, seperti yang dialami oleh investor plat merah. Karena itu, pembangunan pariwisata di Manggarai Barat hari ini belum menunjukkan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. Sebab, sumber-sumber pariwisata dikuasai oleh pemerintah pusat dan para investor yang difasilitasi dan diberi banyak kemudahan dalam berusaha oleh pemerintah pusat. Pada 2019, dengan kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, total penanaman modal asing di Manggarai Barat adalah sebesar 1,2 triliun rupiah.

Kebijakan Pro-Pertumbuhan dan Pro-Kapital

Selain sentralisasi pengelolaan pariwisata, pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada investor. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi fokus pembanguan pariwisata, maka pemerintah, terutama pemerintah pusat, berusaha untuk menarik investor dengan menyediakan fasilitas publik yang baik dan memberikan banyak kelunakan, seperti privatisasi tanah, import input pariwisata, dan buruh murah. Kebijakan seperti ini memberi keuntungan bagi akumulasi kapital para pelaku usaha dan investor, yang mayoritas berasal dari luar Manggarai barat, terutama dari Sulawesi, Bali, Jawa, Sumatra, dan bahkan luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi memang positif, tetapi hal itu tidak diikuti oleh perluasan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

Privatisasi dan Perampasan Tanah

Privatisasi tanah di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo dan beberapa pulau di dalam TNK, sudah terjadi sejak 1990an. Privatisasi tanah itu terus meningkat tajam pada periode 2005-2020. Akibatnya, hari ini, tanah-tanah di kota Labuan Bajo, terutama tanah yang strategis, seperti wilayah pinggir pantai di sekitar kota Labuan Bajo ke arah Barat atau yang letaknya di punggung Bukit Binongko, Bukit Silvia sampai di dermaga Multi Purpose, yang menghadap ke lautan Labuan Bajo yang indah, sudah menjadi milik para investor yang berasal dari Sulawesi, Bali, Jawa, Sumatra, dan bahkan luar negeri. Disinyalir, tanah-tanah di Labuan Bajo juga sudah menjadi milik para artis, pengusaha, birokrat, polisi, militer, politisi dan orang-orang besar di Jakarta. Karena kepemilikan tanah oleh orang-orang yang berkuasa ini, sering terjadi konflik agraria di Manggarai Barat, terutama di sekitar kota Labuan Bajo dan beberapa pulau dalam zona TNK.

Intensitas privatisasi tanah yang tinggi ini telah menyebabkan perampasan tanah (*land grabbing*). Perampasan tanah ini dilakukan baik melalui mekanisme pasar maupun melalui negosiasi,

penyerobotan, dan pengklaiman sepihak terhadap tanah ulayat atau tanah pribadi milik masyarakat. Perampasan tanah melalui mekanisme pasar, seperti dijelaskan sebelumnya, marak terjadi, tetapi hampir tidak ada upaya dari pemerintah untuk mencegah perampasan tanah melalui mekanisme pasar ini. Masyarakat adat atau masyarakat Manggarai Barat, terutama di sekitar kota Labuan Bajo, yang belum pernah mengalami gelombang perampasan tanah seperti ini sebelumnya, tidak memiliki mekanisme untuk menghambat terjadinya perampasan tanah melalui mekanisme pasar ini. Apalagi, institusi adat di Manggarai Barat tidak melarang dan mencegah komodifikasi tanah, seperti institusi adat di tempat lain di Flores, seperti di Ngada, Nagekeo, dan Ende.⁴⁴

Perampasan tanah melalui mekanisme negosiasi dan penyerobotan atau pengklaiman sepihak juga marak terjadi. Perampasan tanah melalui negosiasi adalah pengambilalihan lahan melalui penghibaan dari masyarakat adat kepada pemerintah. Perampasan seperti ini sudah terjadi sejak lama, sejak 1970-an, bahkan sejak zaman kolonial,⁴⁵ untuk kepentingan pembangunan infrastruktur publik, konservasi, dan pembangunan pariwisata. Masyarakat adat memberikan atau menghibahkan tanah dengan janji akan dibangun infrastruktur publik. Selain itu, pemerintah mendekati masyarakat adat untuk mengklaim tanah ulayat (*lingko*) sebagai wilayah hutan negara. Tetapi, tidak jarang, pengklaiman wilayah hutan ini melibatkan sekelompok elit adat yang tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat adat secara keseluruhan.

Penyerobotan tanah dilakukan dengan menduduki tanah ulayat, tanah pribadi, atau bahkan tanah negara tanpa pendekatan terhadap masyarakat terlebih dahulu. Penyerobotan seperti ini terjadi, misalnya, dalam kasus, *pertama*, penetapan wilayah hutan tanpa pelibatan masyarakat adat dan, *kedua*, penyerobotan ruang publik seperti wilayah pantai untuk pembangunan infrastruktur publik dan infrastuktur pariwisata yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Selain itu, tidak jarang terjadi penyerobotan secara legal dengan cara memindahkan batas hutan untuk wilayah tanah yang akan dibeli atau dialokasikan kepada investor secara diam-diam dengan mengubah titik batas dalam peta kehutanan negara. Penyerobotan legal ini adalah perampasan terhadap tanah negara oleh oknum-oknum pemerintahan, elit-elit pemerintah daerah dan pusat, dan investor demi akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi. Pada 2021, misalnya, BOP ingin mengkapling wilayah hutan dari Ngorang sampai Lancang seluas 400 hektar negara untuk membangun pariwisata buatan. Apalagi, pemerintah Manggarai Barat cenderung melihat bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan di Manggarai Barat hanya bisa diatasi dengan mendatangkan investor. Karena itu, segala upaya dilakukan, termasuk dengan memanipulasi legalitas tanah negara, untuk kepentingan investor yang dianggap dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan memberikan pemasukan untuk PAD daerah melalui pajak.

Perampasan tanah di Manggarai Barat ini menghasilkan dua macam konflik agraria, yang kerap terjadi di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya serta di dalam TNK. *Pertama*, konflik agraria horizontal. Konflik ini melibatkan masyarakat sendiri, yang terjadi di dalam keluarga besar atau di dalam sebuah suku itu sendiri. Konflik ini disebabkan oleh tumpang-tindih klaim atas tanah sebelum dan setelah tanah dijual. *Kedua*, konflik agraria vertikal. Konflik ini melibatkan masyarakat dengan pemerintah atau pihak investor. Tidak jarang, pemerintah memfasilitasi pengalihan tanah ulayat menjadi tanah negara, yang kemudian diprivatisasi dan digunakan untuk kepentingan akumulasi modal. Berkaitan dengan

⁴⁴Emilianus Yakob Sese Tolo, "Akumulasi Melalui Perampasan Dan Kemiskinan Di Flores." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* (2016), hlm. 173-204.

⁴⁵*Ibid.*

konflik seperti ini, pemerintah cenderung bungkam. Jika pemerintah daerah Manggarai Barat terlibat, maka pemerintah cenderung membela pihak investor. Sebab, pemerintah daerah dan pemerintah pusat ingin memberikan kenyamanan yang prima untuk investor. Tujuan dari keberpihakan ini adalah, *pertama*, demi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dan, *kedua*, untuk akumulasi modal pribadi. Tidak jarang para investor adalah perusahaan plat merah dan perusahaan milik para pejabat publik dan pejabat politik baik di daerah maupun di pusat.

Karena lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, negara neoliberal Indonesia memang mengetahui persoalan privatisasi dan perampasan tanah ini, tetapi mereka mengabaikan persoalan ini. Para pejabat dan politikus di daerah menyadari persoalan ini, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena kuatnya sentralisasi negara neoliberal, di mana semua rencana, arah, dan dana pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, terutama di kota Labuan Bajo dan TNK, diatur secara terpusat oleh pemerintah nasional, bahkan dengan menempatkan intitusi-intitusi perwakilannya di daerah seperti BTNK dan BOP, yang tidak bertanggungjawab terhadap pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat. Akibatnya, agenda neoliberal ini berjalan mulus tanpa hambatan walaupun implikasi penyingkiran dan kemiskinan di Manggarai Barat sudah dirasakan oleh masyarakat hari ini.

Impor Input Pariwisata dan Buruh Murah

Karena orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi yang bisa digerakkan dengan cepat dalam waktu yang singkat, maka yang harus dilakukan adalah melakukan impor input industri pariwisata, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan impor ini didukung oleh kebijakan buruh murah. Tujuan kebijakan impor dan buruh murah ini adalah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang singkat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa naik positif, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengabaian terhadap sumber daya lokal dan hak-hak buruh, terutama berkaitan dengan kondisi kerja yang nyaman dan upah buruh yang layak.

Import Bahan Makanan

Industri pariwisata di Manggarai Barat sangat bergantung pada import bahan makanan dari luar Manggarai Barat. Berdasarkan data dari dinas pariwisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020, 85% persediaan logistik makanan yang menggerakkan industri pariwisata di Manggarai Barat diimpor dari luar daerah. Impor bahan makanan ini dibagi dalam dua bagian. *Pertama*, impor bahan makan dari wilayah NTT sendiri. Bahan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kota Labuan Bajo dan sekitarnya dipasok dari Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Namun demikian, pasokan bahan makan dari Lembor tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Labuan Bajo dan industri pariwisatanya. Karena itu, bahan makanan, seperti sayur-sayuran dipasok dari kabupaten Ngada dan Ende. Para pedagang sayur dan buah-buahan setiap hari memasuki kota Labuan Bajo dengan mobil *pick up* yang berisi penuh dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dari Ngada dan Ende.

Para pedagang dari Ngada dan Ende yang bermodal sekitar 10.000.000-70.000.000 biasanya menjual sayur-sayuran dan buah-buahan di dekat pasar harian Labuan Bajo. Karena itu, pasokan sayur-

sayuran dan buah-buahan oleh pedagang dari Ende dan Ngada ini lebih terkonsentrasi untuk kebutuhan masyarakat kota Labuan Bajo. Memang ada beberapa hotel melati dan kapal-kapal pariwisata yang kecil yang membeli bahan makanan di Pasar Labuan Bajo, tetapi mayoritas sayur-sayuran dan buah-buahan ini dikonsumsi oleh masyarakat di kota Labuan Bajo dan sekitarnya.

Namun, para pedagang dari Ngada dan Ende ini tidak diizinkan oleh polisi pamong praja Kabupaten Manggarai Barat untuk berjualan di dalam Pasar Labuan Bajo. Karena itu, para pedagang dari Ngada dan Ende ini kerap kali diusir paksa oleh polisi pamong praja. Namun, walaupun kerap diusir, para pedagang itu tetap kembali ke tempat penjualan dan siap mengungsi kembali ke tempat persembunyiannya jika diusir kembali oleh polisi pamong praja.

Pelarangan dan pengusiran terhadap para pedagang dari Ngada dan Ende ini tidak dilakukan dengan tegas dan serius. Alasan paling utama adalah bahwa para pedagang dari Ende dan Ngada ini adalah pemasok sayur-sayuran dan buah-buahan murah, yang akan dibeli oleh para pedagang asal Manggarai Barat di dalam pasar harian Labuan Bajo itu sendiri. Harga jual sayur-sayuran dan buah-buahan dari para pedagang dari Ende dan Ngada adalah sekitar 45%-50% lebih murah daripada sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam Pasar Labuan Bajo. Misalnya, sayur sawit dijual oleh pedagang dari Ende dan Ngada senilai 10.000 rupiah, tetapi di dalam Pasar Labuan Bajo yang jaraknya hanya sekitar 15 meter dari para pedagang Ngada dan Ende harganya sudah menjadi 15.000 rupiah. Masyarakat Labuan Bajo tidak jarang membeli langsung pada pedagang dari Ngada dan Ende, kecuali jika mereka sedang diusir atau dilarang oleh polisi pamong praja. Keberadaan pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan dari Ngada dan Ende dilarang, tetapi sekaligus dibutuhkan. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini polisi pamong praja, tidak bisa menjalankan kebijakannya dengan tegas akibat kondisi dan pertimbangan material ini.

Selain bahan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, bahan makanan yang diimpor dari luar adalah bahan makanan yang tidak atau belum bisa diproduksi di Labuan Bajo sendiri untuk kebutuhan rumah makan dan hotel di Labuan Bajo. Misalnya, daging *se'i babi* kerap kali diimpor langsung dari Kupang. Selain *se'i babi*, ayam pedaging sering diimpor dari wilayah Ngada dan Nagekeo. Selain itu, kebutuhan ikan di Labuan Bajo dipasok dari Maumere dan Larantuka, yang dibawa setiap hari ke Labuan Bajo dengan *pick up*, yang nantinya akan dibongkar di pasar ikan Labuan Bajo. Sampai di pasar ikan Labuan Bajo, ikan-ikan dari Maumere dan Larantuka dibeli atau diborong oleh pengusaha ikan di Labuan Bajo untuk dijual kembali di pasar ikan Labuan Bajo atau di beberapa titik lain di Labuan Bajo, seperti di restoran dan pasar Labuan Bajo. Menurut kepala dinas perikanan, pasokan ikan dari sumber lokal di Labuan Bajo pada 2020 hanya mencapai 4.000 ton, sebuah jumlah terus berkurang dari tahun ke tahun akibat beralihnya nelayan menjadi pelaku pariwisata. Sebab, para nelayan menjadikan kapal ikan mereka kapal para turis, yang lebih menjanjikan keuntungan ekonomi dengan kerja yang tidak terlalu berat. Karena itu, pasokan ikan di Labuan Bajo tidak bisa tidak harus disuplai dari kabupaten lain di Flores, seperti dari kabupaten Sikka dan Flores Timur.

Kedua, impor bahan makanan dari luar NTT. Bahan makanan yang diimpor dari luar NTT biasanya berupa telur, daging, ikan, kentang, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan yang belum banyak diproduksi di NTT seperti apel, salak, dan beberapa jenis buah yang lain. Barang-barang ini diimpor dari Sulawesi, Bima, Lombok, dan Jawa. Pengimpor barang-barang ini dilakukan oleh pedagang bermodal besar sekitar ratusan sampai miliaran rupiah. Para pengimpor ini bisa orang lokal sendiri, seperti para pedagang Tionghoa, tetapi juga orang dari Sulawesi, Bima, Lombok, dan Jawa. Barang-barang yang diimpor dari luar NTT ini, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan

masyarakat Manggarai Barat di Pasar Labuan Bajo, juga langsung digunakan untuk kebutuhan hotel-hotel bintang 4 dan 5 dan kapal-kapal pariwisata yang mewah di Labuan Bajo. Alasan hotel-hotel bintang 4 dan 5 mengimpor adalah soal mutu barang dan kepastian pasokan. Pihak hotel dan kapal merasa bahwa mutu barang dari luar NTT lebih baik dengan harga lebih murah. Beberapa hotel besar belum bisa mengharapkan pasokan lokal dengan alasan kemampuan produsen lokal belum dapat menjamin kesinambungan pasokan dalam jumlah yang dibutuhkan oleh pihak hotel dan kapal pariwisata. Karena itu, industri pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya memang sangat bergantung pada pasokan bahan makanan dari luar NTT.

Tidak seperti nasib para pedagang sayur dari Ende dan Ngada yang dilarang oleh polisi pamong praja Kabupaten Manggarai Barat, para pedagang dan pengimpor bermodal ratusan hingga miliaran rupiah, yang mengimpor bahan makanan dari luar NTT, tidak dilarang oleh pemerintah, termasuk polisi pamong praja Manggarai Barat. Sebenarnya, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai mengeluhkan persoalan ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka sadar bahwa industri pariwisata Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo, bergantung pada input bahan makanan dari luar Manggarai Barat, terutama dari luar NTT. Hingga hari ini, belum ada kebijakan serius untuk mengatasi persoalan ini, misalnya, dengan mengadvokasi dan mendorong masyarakat di sekitar kota Labuan Bajo untuk memproduksi sayur dan buah-buahan. Menurut para pejabat dan politisi di Kabupaten Manggarai Barat, masyarakat Manggarai Barat bermental malas dan memiliki SDM yang masih rendah, sehingga tidak bisa dan tidak mampu memproduksi bahan makanan sendiri untuk kepentingan pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Akan tetapi, menurut para petani, mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha pertanian, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Padahal, terdapat banyak tanah subur dan strategis yang bisa dijadikan perkebunan sayur dan buah di sekitar kota Labuan Bajo.

Pengabaian pemerintah untuk membantu dan mengadvokasi petani di Manggarai Barat menjadi peluang bisnis bagi pengusaha sayur dari luar NTT, misalnya dari Sumatra. Tidak jauh dari kota Labuan Bajo ke arah Barat, seorang pengusaha sayur dari Sumatra membuka dua buah kebun sayur dan buah yang cukup besar, sekitar 1-2 hektar di atas tanah sewaan dari petani Manggarai Barat di Labuan Bajo. Satunya terletak di lokasi persawahan dan yang lainnya terletak agak di atas bukit yang juga tidak jauh dari kota Labuan Bajo. Pengusaha dari Sumatra ini mempekerjakan orang-orang Labuan Bajo sendiri dan beberapa mahasiswa praktik dari Manado, yang tidak diupah sama sekali, untuk mengelola kebun sayur dan buah miliknya untuk kebutuhan masyarakat, hotel, restoran, dan kapal pariwisata di Labuan Bajo. Dalam sebulan, dua kebun sayur ini bisa memproduksi 3-4 ton buah-buahan untuk kebutuhan industri pariwisata di Labuan Bajo. Para pekerja yang adalah orang-orang Manggarai Barat sendiri hingga saat ini belum berencana berhenti dan membuka kebun sayur dan buah di atas tanah mereka sendiri yang luasnya sekitar 1-2 hektar dengan alasan ketiadaan modal untuk membeli pipa selang air, motor pengisap air, pupuk, dan biaya tenaga kerja.

Impor Tenaga Kerja

Selain bahan makanan, industri pariwisata di Manggarai Barat, terutama di hotel, restoran, dan kapal di Labuan Bajo didukung oleh impor tenaga kerja dari luar Kabupaten Manggarai Barat. Pemerintah daerah Manggarai Barat sudah menganjurkan agar setiap industri pariwisata di Manggarai Barat sekurang-kurangnya memberikan kuota 50% pekerjanya kepada warga Manggarai Barat. Karena

itu, para birokrat dan politisi Labuan Bajo, ketika ditanya soal impor tenaga kerja, menjawab seperti ini: “Lima belas hotel berbintang di Labuan Bajo sudah didominasi oleh tenaga kerja lokal sebanyak 50%.”⁴⁶ Menurut ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Kabupaten Manggarai Barat (PHRI), “Kalau dilihat secara akumulatif memang para pekerja di hotel sekitar 80% adalah pekerja lokal, tetapi yang menjabat sebagai top manajemen berasal dari luar.”⁴⁷ Tetapi, dalam kenyataan, jawaban dan harapan dari pemerintah daerah dan ketua PHRI ini sulit menjadi kenyataan. Misalnya, Sundalama Resort yang terletak di pulau Seraya memiliki 51 pekerja, yang 72% di antaranya berasal dari luar Manggarai Barat. Sementara itu, di Sudamala Resort di Gorontalo, dari total 72 pekerja, 51% berasal dari luar Manggarai Barat.

Kesulitan untuk mengikuti anjuran pemerintah daerah adalah sumber daya manusia yang terbatas di Manggarai Barat. Pada tahun 2018, rata-rata lama penduduk Manggarai Barat yang bersekolah hanyalah 7,18 tahun, setaraf dengan kelas 1 SMP. Karena itu, para investor dan pengusaha tidak ingin mengambil risiko untuk berinvestasi pada perbaikan sumber daya manusia yang tentunya lebih mahal. Akan tetapi, ada segelintir hotel yang berinisiatif mengirim pekerjanya untuk belajar di Bali untuk peningkatan sumber daya manusianya. Hotel Anaya di Labuan Bajo, misalnya, pernah mengirim 70% (40 orang) dari total pekerja lokalnya untuk mengikuti pelatihan di Bali. Namun, tidak semua hotel melakukan hal ini karena, bagi mereka, mengimpor tenaga kerja yang siap pakai dari Sulawesi, Lombok, Bali, Jawa, dan bahkan luar negeri yang siap pakai, akan lebih murah dan praktis karena tak harus mengeluarkan biaya produksi tambahan.

Tenaga kerja impor dalam industri pariwisata di Manggarai Barat dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, tenaga kerja berkeahlian tinggi. *Kedua*, tenaga kerja tak berkeahlian. Tenaga kerja impor berkeahlian tinggi ini biasanya didatangkan dari Bali, Sulawesi, Lombok, dan Jawa. Mereka biasanya menjadi manajer hotel, pemimpin restoran, juru mudi, kapten kapal, dan pekerja konstruksi bangunan, seperti pelabuhan dan hotel-hotel berbintang di Labuan Bajo. Sementara itu, tenaga impor yang tak berkeahlian biasanya berasal dari NTT, seperti dari kabupaten lain di Pulau Flores, Timor, Sumba, Alor, Sabu, dan Rote. Mereka biasanya bekerja sebagai penjaga toko, anak buah kapal, satpam hotel, sopir, pemandu wisata, pelayan hotel dan restoran, dan *cleaning service*.

Tenaga kerja impor ini sejatinya sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata di Manggarai Barat. Tanpa pekerja impor ini, pembangunan pariwisata tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah mengetahui persoalan ini, tetapi masih belum ada langkah konkret yang dibuat. Pemerintah nasional juga sudah memahami hal ini dan, karena itu, menempatkan BOP di Labuan Bajo, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia pelaku dan pendukung pariwisata di Manggarai Barat. Namun, karena sering mengalami gesekan dengan *stakholder* terkait di pemerintahan daerah dan tumpang tindih wewenang, keberadaan BOP tidak berdampak banyak bagi peningkatan mutu dan kualitas manusia Manggarai Barat yang siap mendukung perkembangan dan pembangunan industri pariwisata di kabupaten tersebut.

⁴⁶ Wawancara di Labuan Bajo pada 23 Juni 2021.

⁴⁷ Wawancara di Labuan Bajo pada 23 Juni 2021.

Kebijakan Betting On The Strong

Kebijakan pembangunan industri pariwisata di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo dan di dalam kawasan TNK, sangat berpihak pada yang kuat (*betting on the strong*).⁴⁸ Investasi besar, seperti hotel dan kapal, dibuka seluas-luasnya untuk investor yang bermodal besar. Selain keterbukaan dan kelenturan investasi yang diberikan, pemerintah seolah membiarkan persaingan tidak sehat terjadi antara pemilik modal besar, seperti hotel berbintang di Labuan Bajo, dan pengusaha pariwisata yang lain. Tidak jarang hotel-hotel berbintang di Labuan Bajo mengakuisisi semua jasa pelayanan pariwisata untuk para turis. Misalnya, hotel-hotel berbintang memiliki transportasi darat dan lautnya sendiri. Karena itu, para tamunya dijemput langsung di Bandara Komodo, lalu diantar ke hotel, dan bisa disewa untuk melihat-lihat tempat wisata lain di sekitar Labuan Bajo atau di luar Labuan Bajo. Hotel-hotel berbintang di Labuan Bajo juga memiliki *speed boat*-nya sendiri, yang bisa mengantar para turis, yang adalah tamu hotel untuk melihat komodo atau menikmati keindahan alam lautan di TNK. Selain itu, setiap hotel berbintang memiliki restorannya sendiri, yang melayani kebutuhan para tamu hotelnya sendiri.

Akibat dari akuisisi jasa transportasi dan kuliner ini, pertumbuhan ekonomi pariwisata tidak bisa merembes sampai kepada masyarakat Manggarai Barat, terutama mereka yang terlibat di sektor jasa, seperti transportasi dan kuliner. Beberapa pemilik kapal turis sederhana yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Barat mengeluhkan kerakusan hotel berbintang di Labuan Bajo yang mengakuisisi semua peluang pelayanan jasa industri pariwisata. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh para sopir mobil rental di Labuan Bajo. Pemerintah daerah mengetahui hal ini. Akan tetapi, mereka tidak bisa bertindak tegas karena harus patuh pada pemerintah pusat yang telah memberikan izin investasi untuk hotel berbintang ini, yang dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dan pajak untuk negara. Padahal, akuisisi peluang pelayanan jasa pariwisata oleh hotel-hotel berbintang ini sangat merugikan bagi usaha kecil menengah di Labuan Bajo. Namun, pemerintah daerah dan nasional tetap pada pendirian kebijakan *betting on the strong* (bertaruh pada yang kuat), yakni para investor bermodal besar, demi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kebijakan zonasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo sangat merugikan para nelayan yang hidup di dalam TNK. Kebijakan zonasi memang baik untuk proyek konservasi, tetapi hal itu telah mengurangi mata pencaharian nelayan kecil, walaupun akhir-akhir ini kebijakan zonasi ini semakin melonggar, misalnya, nelayan hanya boleh memancing dan menangkap ikan jika tidak ada turis di sekitar tempat penangkapan ikan. Waga Pulau Komodo, yang mayoritasnya adalah nelayan, harus beralih profesi menjadi pemandu turis (*naturalist tourist guide*) di Loh Liang. Pada 2019, jumlah penduduk di Pulau Komodo adalah 1.719 jiwa. Namun, yang dipekerjakan oleh BTNK sebagai *naturalist tourist guide* itu hanya berjumlah sekitar 33 orang, yang dibayar 60.000 rupiah setiap kali menemani setiap kelompok turis yang melihat komodo. Sekitar 30-50 rumah tangga berjualan bahan makanan ringan dan *souvenir* di Loh Liang, pantai *Pink* (*pink beach*), dan beberapa pulau kecil lainnya. Beberapa rumah tangga menjadi pembuat patung komodo. Namun, dari total jumlah penduduk di Pulau

⁴⁸Gerry van Klinken, *The Making Of Middle Indonesia: Kelas Menengah Di Kota Kupang, 1930an-1980an* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Dan Kitlv-Jakarta, 2015).

Komodo dan di TNK, ketersediaan lapangan kerja sangatlah kurang akibat kebijakan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan BTNK.

Bagi para kapten kapal turis, nelayan, petugas dan pegawai BTNK, peneliti, dan pemerintah daerah, keberadaan nelayan di TNK mengganggu pemandangan bagi para turis dan mengganggu ekosistem laut. Padahal, para nelayan ini memancing dan menangkap ikan dengan peralatan tradisional yang sangat sederhana. Selain itu, masyarakat Pulau Komodo yang sebelumnya biasa berternak kambing dan bercocok tanam di beberapa pulau di dalam kawasan TNK kini dilarang aktivitasnya oleh BTNK. Padahal, tanah pertanian yang bisa dikelola oleh masyarakat di Pulau Komodo saat ini tidak sampai 20 hektar. Karena itu, dari sekitar 1719 penduduk di pulau Komodo, tidak semua rumah tangga yang memiliki lahan untuk bercocok tanam. Semua kebutuhan makanan dan sayuran mereka harus dibeli di Labuan Bajo, yang ditempuh dalam waktu 4-5 jam dengan menggunakan perahu motor reot milik seorang penduduk Pulau Komodo yang beroperasi setiap dua hari sekali. Ketika didapati sedang memancing dan menangkap ikan di TNK, para nelayan ini ditangkap, diteror, dan dipukul. Pada masa Orde Baru, menurut masyarakat di pulau Komodo, ada nelayan yang bahkan dibunuh. Ternak yang diternak di pulau-pulau di dalam kawasan TNK dibunuh. Padahal, kebiasaan seperti ini, yakni mencari ikan, bercocok tanam dan berternak di pulau-pulau kecil di dalam kawasan TNK, adalah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu.

Dengan kebijakan zonasi ini, masyarakat di dalam TNK, seperti di Pulau Komodo, semakin menderita. Karena tidak ada jalan keluar, beberapa masyarakat Pulau Komodo terpaksa merantau ke Labuan Bajo atau ke tempat lain. Beberapa dari mereka beternak cumi dan tetap melaut sembari siap menerima teror, ancaman, dan pukulan kapan saja ketika mereka melanggar zonasi yang sudah ditetapkan pemerintah dan BTNK. Pemerintah lokal dan nasional mengetahui persoalan ini, tetapi mereka tidak bisa mencari jalan keluar yang tepat. Pemerintah propinsi, di bawah pemerintahan Viktor Laiskodat, ingin memindahkan atau merelokasikan masyarakat yang sudah tinggal beberapa abad di pulau Komodo ke tempat lain. Gubernur Laiskodat ingin menjadikan TNK sebagai wisata super premium, di mana setiap tamu yang mengunjungi TKN harus membayar sebesar USD 1.000 (sekitar 14.000 rupiah) dan, karena itu, penduduk di TNK, terutama di Pulau Komodo, perlu dikosongkan. Terhadap kebijakan ini, masyarakat di Pulau Komodo menolak keras, dan penolakan ini didukung oleh berbagai elemen *civil society* di Manggarai Barat.

Pemerintah ingin berpihak kepada orang-orang kuat yang berduit (*betting on the strong*), seperti para turis dan investor, yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu, keberadaan masyarakat kecil dan miskin di Pulau Komodo sangat mengganggu agenda neoliberal pemerintah. Pemerintah, karena itu, tidak suka dengan keberadaan masyarakat yang mendiami pulau-pulau di dalam kawasan TNK. Sikap tidak suka dari pemerintah nasional dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di Pulau Komodo, misalnya, terlihat jelas dari pembangunan di pulau itu. Kapal motor yang melayani transportasi Pulau Komodo dan Labuan Bajo sangat reot dan tidak layak untuk beroperasi, sehingga bisa saja tenggelam dihantam gelombang. Dermaga di kampung Komodo sangat buruk; dermaga tersebut hanya terbuat dari kayu. Kampung Komodo berkondisi kumuh dan kotor akibat kurang perhatian dari pemerintah. Keinginan warga untuk membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pulau Komodo tidak disetujui oleh pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Karena itu, anak-anak di Pulau Komodo harus melanjutkan SMA di kota Labuan Bajo dan harus tinggal dengan keluarga atau indekos jika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Akibatnya, banyak sekali anak-anak di pulau ini yang putus sekolah setelah

menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pulau Komodo. Dengan pendidikan hanya tamat SMP, mereka mau tidak mau menjalani hidup seperti kedua orang tuanya, melaut penuh dengan ketakutan, atau berdagang di Loh Liang dan beberapa pulau kecil dengan pendapatan tak menentu karena masing-masing kapal motor yang mengunjungi Pulau Komodo memiliki persediaan makanannya sendiri. Karena itu, lambat laun, Pulau Komodo akan ditinggalkan oleh generasi muda. Bagi yang masih tetap ingin tinggal di sana, mereka harus siap melihat sebuah masa depan yang suram.

Buruh Murah

Negara neoliberal yang menekankan pertumbuhan ekonomi pasti mempromosikan buruh murah. Pada 2021, upah minimum Manggarai Barat adalah sebesar Rp. 1.950.000,00. Namun, dalam kenyataan, berdasarkan data yang dikumpulkan, kami menemukan tidak sedikit pekerja yang digaji di bawah UMP Manggarai Barat. Gaji terendah yang kami temukan di lapangan adalah Rp. 500.000,00 dari seorang pekerja pelayan restoran. Gaji tertinggi adalah sebesar Rp. 58.000.000,00, yakni gaji manajer Hotel Inaya Bay Labuan Bajo. Sementara itu, buruh kasar bangunan di Labuan Bajo dibayar Rp. 50.000,00-Rp. 60.000,00 per hari; sekitar Rp. 1.500.000,00-Rp. 1.800.000,00 per bulan, yang berarti berada di bawah UPM Labuan Bajo.

Berbanding terbalik dengan gaji, biaya hidup di Labuan Bajo sangat mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Flores dan NTT. Biaya kos adalah sekitar Rp. 600.000,00 - Rp. 800.000,00 per bulan, jadi sekitar 30%-40% dari UMP. Biaya makan-minum juga mahal. Misalnya, harga jus di restoran Escape Labuan Bajo segelas adalah sekitar Rp. 40.500,00. Harga nasi ikan dan minum teh hangat di warung Padang adalah sekitar Rp. 25.000,00. Harga dua porsi sup ikan di Warung Kelan adalah sekitar Rp. 146.000,00. Seorang polisi yang baru saja bertugas di Labuan Bajo mengeluhkan kemahalan biaya hidup di kota tersebut, yang membuat gaji bulanannya tidak cukup untuk membiayai hidup keluarganya. Untuk bisa hidup menambah penghasilan, polisi ini terlibat dalam bisnis minuman tradisional lokal yang disebut *moke* atau *sopi*. Selain itu, para PNS di Labuan Bajo biasanya memiliki pendapatan sampingan dengan membeli mobil melalui jalur kredit atau tanpa jalur kredit untuk dijadikan mobil rental, yang akan disewakan kepada para turis di Labuan Bajo, untuk menambah penghasilan. Apalagi, akses para PNS terhadap kredit lebih terbuka karena mereka memiliki pendapatan bulanan dari negara dan selalu diberikan prioritas dalam mengakses kredit di koperasi dan bank yang ada di Manggarai Barat.

Dengan kebijakan buruh murah dan biaya hidup tinggi ini, pembangunan ekonomi pariwisata di Manggarai Barat memang tumbuh. Namun, pertumbuhan itu terakumulasi di tangan mereka yang memiliki modal, terutama yang terlibat dalam aktivitas bisnis pariwisata. Karena itu, masyarakat banyak, yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas bisnis pariwisata, mengalami tekanan ekonomi yang hebat. Karena jalan keluar sudah tidak ada, maka tidak jarang tekanan ekonomi yang tinggi sebagai akibat dari perkembangan industri pariwisata yang mementingkan pertumbuhan ekonomi ini, masyarakat Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo, menjual tanah untuk bisa menghidupkan diri dan keluarga mereka.

Korupsi Merajalela

Korupsi di Kabupaten Manggarai Barat adalah sebuah persoalan yang serius. Dengan tekanan biaya hidup yang tinggi di Labuan Bajo, korupsi memang menjadi hal yang mungkin akan dilakukan. Apalagi, organisasi masyarakat atau *civil society* belum tumbuh kuat di Manggarai Barat. Akibatnya, korupsi berjalan tanpa hambatan yang berarti. Beberapa kasus korupsi yang berhasil dibongkar ke publik akhir-akhir ini hanyalah fenomena gunung es.

Korupsi di Manggarai tidak saja dilakukan oleh sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah korupsi terhadap dana dan aset publik. Korupsi terhadap dana publik, terutama dana promosi pariwisata, sudah disinggung oleh Erb⁴⁹ dan karena itu tidak perlu dipaparkan lagi di sini. Korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah korupsi tanah, yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat politik di Manggarai Barat. Dalam wawancara, para birokrat dan pemerintah membenarkan bahwa pemerintah Manggarai Barat memiliki cukup banyak aset tanah. Aset tanah yang melimpah inilah yang menjadi sumber korupsi bagi para pejabat publik dan politik di Manggarai Barat.

Beberapa pejabat publik dan politik sudah dipenjara karena terlibat dalam korupsi tanah negara demi kepentingan investor pariwisata. Belum lama ini, pada Juni 2021, mantan Bupati Manggarai Barat, periode 2010-2020, Agustinus Ch. Dulla, divonis penjara 7 tahun karena telah mengalihkan kepemilikan aset negara sebesar 30 hektar ke pihak investor pariwisata yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dalam kasus yang sama, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, Marthen Ndeo, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Jadi, persekongkolan antara pejabat politik, seperti bupati, dan pejabat publik, seperti kepala BPN, dan investor, telah menyebabkan terjadinya kasus korupsi tanah. Kasus yang menimpa mantan Bupati Manggarai, Agustinus Ch. Dulla, hanyalah fenomena gunung es korupsi tanah di Manggarai Barat. Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, persoalan tanah menjadi persoalan serius di Manggarai Barat. Persoalan ini melibatkan para politisi dan pejabat publik nasional dan, karena itu, sulit diendus oleh KPK. Misalnya, berdasarkan wawancara di lapangan, perubahan batas hutan sebagai akibat dari penetrasi kapital di areal hutan di sekitar kota Labuan Bajo itu pernah terjadi, tetapi dilakukan secara sangat hati-hati dan rahasia sehingga tidak sampai terbongkar ke publik. Perubahan batas hutan ini tentu melibatkan pejabat politik daerah, kepala Dinas Kehutanan Manggarai Barat, dan investor, baik itu investor pariwisata *plat merah* maupun investor *non-plat merah*.

Di TNK sering terjadi pungutan liar. Para pekerja di kapal-kapal wisata mengeluhkan tindakan koruptif yang dilakukan oleh petugas BTNK. Pelaporan dan pengaturan tiket, berdasarkan pengamatan lapangan di Loh Liang, tidak dilakukan secara serius dan sistematis dan rawan terhadap rekayasa untuk dikorupsi, baik oleh petugas kapal wisata maupun pegawai BTNK. Pungutan liar, misalnya, berkaitan dengan penerbangan *drone*. Petugas BTNK meminta pungutan bisa sampai Rp. 1.000.000,00 rupiah dari para turis. Padahal, berdasarkan aturan yang ditetapkan, pungutan untuk kepentingan fotografi hanyalah sebesar Rp. 250.000,00. Akibat dari korupsi ini, sering terjadi perselisihan antara para turis, anak buah kapal, dan petugas TNK. Berdasarkan informasi dari beberapa responden, para petugas TNK tidak jarang memiliki aset dan kekayaan berlimpah di Labuan Bajo atau di tempat lain akibat tindakan koruptif dan rekayasa yang mereka lakukan di TNK.

⁴⁹Maribeth Erb, "Shaping A 'New Manggarai': Struggles Over Culture And Tradition In An Eastern Indonesian Regency"; Maribeth Erb, "Limiting Tourism And The Limits Of Tourism: The Production And Consumption Of Tourist Attractions In Western Flores."

Selain korupsi tanah dan rekayasa di TNK, korupsi terhadap sumber daya yang penting untuk menggerakkan industri pariwisata adalah korupsi bahan bakar. Ratusan kapal pariwisata beroperasi setiap hari di dalam TNK. Kapal pariwisata ini mengantar turis dan penumpang untuk melihat komodo atau menikmati keindahan alam laut di dalam TNK. Pemilik kapal-kapal ini kebanyakan berasal dari Bali, Jawa, Sumatra, dan bahkan luar negeri. Kapal-kapal yang dimiliki oleh orang asing, karena dilarang oleh aturan pemerintah, sengaja menggunakan nama orang Indonesia agar bisa melakukan operasi bisnis dengan lebih murah di dalam TNK. Kapal-kapal ini membutuhkan bahan bakar minyak. Akan tetapi, kapal-kapal ini kerap secara sembunyi-sembunyi dan rahasia menggunakan bahan bakar bersubsidi yang dibeli di bawah harga pasar. Transaksi minyak bersubsidi dan dijual secara ilegal di bawah harga pasar ini melibatkan tidak saja pihak-pihak dari Pertamina dan pemilik kapal, tetapi juga pihak keamanan. Korupsi bahan bakar ini tentu merugikan negara dan masyarakat. Namun demikian, karena keterbatasan waktu penelitian lapangan, penelitian ini belum mampu menjelaskan secara lebih detail bagaimana proses dan mekanisme korupsi minyak ini dilakukan dan, karena itu, belum bisa memastikan berapa besar kerugian negara dan akibat negatifnya bagi kehidupan masyarakat Manggarai Barat.

Korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta, menurut kami, lebih berkaitan dengan manipulasi harga dan eksploitasi terhadap buruh. Di Manggarai Barat, para pemandu wisata (*tourist guide*) kerap kali terlibat dalam korupsi dalam proses transaksi. Misalnya, para pemandu wisata bisa menipu para turis untuk menyewa kapal atau mobil wisata dengan harga yang sangat mahal, jauh di atas harga pasar. Perbedaan harga pasar dan harga yang ditawarkan oleh para pemandu pariwisata bisa mencapai 2-10 kali lipat. Korupsi yang dilakukan oleh para pemandu wisata ini merugikan turis sekaligus para pekerja di kapal pariwisata. Ada semacam eksploitasi oleh kelas pekerja terhadap kelas pekerja yang lain. Korupsi seperti ini dilakukan karena memang tidak ada sosialisasi informasi yang sistematis dan teratur tentang harga jasa pelayanan pariwisata oleh pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Pihak pemerintah mengetahui hal ini, namun membiarkannya saja karena mungkin mereka juga melakukan hal yang sama, seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Akibat lanjut dari korupsi ini adalah kelakuan para pemandu wisata di Manggarai Barat yang cenderung mabuk-mabukan karena mereka merasa mereka akan bisa memperoleh uang dengan mudah kapan saja melalui praktik-praktik korupsi ini. Dengan ini, semangat kewirausahaan pun menjadi lentur dan, karena itu, usaha kecil menengah yang muncul dari kalangan para pemandu wisata ini sangat kecil, walaupun tetap ada segelintir yang melakukan itu. Karena tidak sedikit jumlah para pemandu pariwisata adalah orang Manggarai Barat, hal ini telah menghambat pembangunan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat Manggarai Barat sendiri, yang bertentangan dengan pembangunan ekonomi yang didorong oleh investor, yang mayoritas berasal dari luar Manggarai Barat.

Praktik korupsi di Manggarai Barat ini dilakukan selain karena daya kontrol pers dan *civil society* yang kurang dan terbatas, yang akan dibahas lebih mendalam nanti dalam tulisan ini, tetapi juga disebabkan oleh tiadanya sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pariwisata di Manggarai Barat menyebabkan meningkatnya biaya hidup di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo. Namun, dalam kebijakan negara neoliberal, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan gaji, yang menyebabkan kesulitan bagi kelas pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kelas pekerja PNS,

misalnya, memiliki dua pilihan; yakni, *pertama*, mau tidak mau harus terlibat dalam kasus korupsi dan, *kedua*, terjun dalam bisnis sampingan dengan memanfaatkan kemudahan yang mereka peroleh untuk mengakes kredit.

Kemiskinan, Kesenjangan Ekonomi, dan Involusi Gerakan Resistensi

Kemiskinan, Kesenjangan Ekonomi, dan Polusi Lingkungan

Pembangunan pariwisata yang dipromosikan oleh negara neoliberal telah menyebabkan ekonomi bertumbuh positif, kecuali pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat pada 2017 adalah sebesar 5,16%, lalu naik menjadi 5,23% pada 2018 dan 5,54% pada 2019. Karena pandemik Covid-19, pertumbuhan ekonomi pada 2020 sama dengan pada 2019, yakni 5,54% karena pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 83,84%. Pertumbuhan ekonomi di Manggarai Barat dari 2017 ini termasuk kecil. Hal ini disebabkan oleh kebijakan negara neoliberal Indonesia yang terlalu fokus pada pembangunan pada sektor pariwisata dengan mengandalkan peran investor dan mengabaikan sektor lain, seperti pertanian, perikanan, dan pendidikan. Dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya, ekonomi pada 2017 bertumbuh 4,1%, tetapi pada 2018, 2019, dan 2020 terus menurun, yakni 3,82%, 3,14%, dan 0,84%. Di Labuan Bajo hanya terdapat satu perguruan tinggi, yakni Politeknik El Bajo Commodus. Sementara itu, sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan pariwisata tumbuh sangat drastis dari 2017 sampai 2019, kecuali pada 2020, karena pandemik Covid-19. Sebagai contoh, sektor pengadaan listrik dan gas naik dari 1,47% pada 2017 menjadi 17,8% pada 2019, lalu menurun lagi menjadi 6% pada 2019 dan 8,08% pada 2020. Ini berarti bahwa pasokan listrik yang menjadi kebutuhan industri pariwisata benar-benar digenjut pada 2018. Sementara ekonomi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum bertumbuh cukup tinggi dan konsisten dari 12,26% pada 2017 menjadi 12,58% pada 2018, dan 11,67% pada 2019. Akibat pandemik Covid-19, pada 2020, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum mengalami minus sangat drastis, yakni -36,15%. Tren data ini menunjukkan bahwa pembangunan di Manggarai Barat memang lebih berfokus pada sektor pariwisata dengan mengundang para investor dan sekaligus mengabaikan sektor pertanian, kehutanan, pendidikan, dan perikanan yang menjadi sektor yang menghidupi masyarakat Manggarai Barat yang berpenduduk mayoritas petani dan nelayan miskin itu.

Akibat dari pembangunan pariwisata berdasarkan arahan negara neoliberal Indonesia yang sentralistis itu, pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Pada September 2018, kemiskinan di Manggarai Barat mencapai 18,14%, yakni dua kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional. Pada 2019, jumlah kemiskinan hanya turun 0,13%, yakni 18,01%. Di tengah pandemi Covid-19, seorang responden yang adalah pejabat pemerintahan di Manggarai Barat, memperkirakan bahwa, pada tahun 2021, dari total sekitar 260.000 penduduk, sekitar 40% persen merupakan penduduk miskin.⁵⁰ Pada 2018 *gini ratio* adalah sebesar 0,295 dan meningkat sangat tajam menjadi 0,367 pada 2020. *Gini ratio* ini menunjukkan meningkatnya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, yakni 1% orang di Kabupaten Manggarai Barat yang menguasai 36% total kekayaan di Manggarai Barat pada 2020. Pada 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat berskor hanya sekitar 62,58, hanya berada sedikit di atas kategori rendah, yakni 60. Pada 2019, IPM hanya naik menjadi 63,50 pada 2019. Data-data ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata

⁵⁰ Wawancara di Labuan Bajo pada 23 Juni 2021.

yang hanya memfokuskan pada sektor pariwisata dengan mengundang investor besar dan mengabaikan sektor lain, seperti pertanian, kehutanan, pendidikan, dan perikanan menyebabkan dua masalah, yakni, *pertama*, meningkatnya kesenjangan ekonomi dan, *kedua*, kerentanan terhadap krisis, termasuk krisis akibat Covid-19. Karena alasan ini, menurut kepala Binas Pemberdayaan Desa, Mateus Ngabut, “Kemajuan pariwisata tidak berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan memang turun, namun tidak terlalu signifikan.”⁵¹

Selain kemiskinan, polusi atau kerusakan lingkungan juga menjadi masalah baru dalam proses pembangunan pariwisata di Manggara Barat, terutama di Labuan Bajo dan TNK. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang sedang dilakukan saat ini di Pulau Rinca berpotensi mengganggu ekosistem komodo. Banyak sampah yang belum terurus dengan baik. Laut di dermaga Labuan Bajo dan di TNK terlihat kotor dan tercemar limbah dan sampah plastik dari hotel-hotel dan kapal-kapal pariwisata. Masyarakat dan pengusaha pariwisata juga membuang sampah mereka tidak jauh dari kota Labuan Bajo. Petugas kebersihan tidak rutin membersihkan sampah di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Sebuah hotel yang terletak di wilayah Bukit Silvia membuang limbah hotelnya ke jalan umum, yang menimbulkan bau busuk. Menurut seorang responden, yang adalah polisi, pihak hotel pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian, tetapi masih tetap saja membuang limbah hotel ke arah jalan publik.⁵² Setiap bulan, pengepul sampah plastik dan besi tua di Labuan Bajo, yang adalah orang Jawa, mampu mengumpulkan 4-8 ton sampah plastik dan sampah besi tua baik dari Labuan Bajo maupun dari desa-desa di Manggarai Barat. Akibat ekspansi penduduk dan ekspansi pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, hutan di sekitar kota Labuan Bajo ditebang untuk memberi ruang bagi pembangunan pariwisata. Polusi atau kerusakan lingkungan ini akan semakin parah beberapa tahun ke depan jika kebijakan negara neoliberal hanya memfokuskan perhatian para pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dampaknya pada lingkungan hidup.

Involusi Gerakan Resistensi

Sayangnya, dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi serta kerusakan dan pencemaran lingkungan, gerakan resistensi terhadap akumulasi kapital memang sudah ada, tetapi belum terorganisir secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut beberapa responden, hal ini terjadi karena kultur budaya Manggarai Barat yang cenderung menghargai tamu atau orang dari luar dan pola pendidikan yang disediakan oleh negara tidak mengajar peserta didik untuk berpikir kritis untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh korporasi dan negara. Meskipun demikian, di Manggarai Barat, beberapa organisasi yang baru terbentuk dalam 5 tahun terakhir mulai melakukan perlawanan terhadap kapital dan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. *The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), dengan organisasi masyarakat lain, berhasil melawan rencana kenaikan harga tarif Rp. 14.000.000,00 untuk masuk TNK dan mempertanyakan soal jual-beli pulau di TNK. Asosiasi Angkutan Wisata Darat (AWSTAR) berhasil “menolak wacana pemerintah untuk memberlakukan sistem angkutan online”, seperti *Grab Car* dan *Grab Bike*, yang dikuasai oleh pemodal nasional dan asing. Namun demikian, organisasi buruh yang lebih terorganisir belum terbentuk di Manggarai Barat.

⁵¹ Wawancara di Labuan Bajo pada 23 Juni 2021.

⁵² Wawancara di Labuan Bajo pada 23 Juni 2021.

Karena itu, gerakan perlawanan di Manggarai Barat hanyalah gerakan perlawanan yang Tolo⁵³ sebut sebagai “gerakan perlawanan spontan”, yang notabene sering terjadi di Flores. Gerakan spontan ini, selain bersifat fragmentaris, juga kasuistik. Advokasi tidak berkelanjutan, hanya menunggu momen untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, seperti kasus wacana *Grab Car* dan *Grab Bike*, perampasan areal publik di Pantai Pede dan rencana evakuasi masyarakat di Pulau Komodo, sebagaimana dilakukan oleh AWSTAR dan ASITA.

Peran akademisi di Manggarai Barat juga sangat rendah dalam mengontrol kapital dan negara neoliberal. Hal ini disebabkan oleh tidak tumbuhnya industri jasa pendidikan tinggi di Manggarai Barat, terutama Labuan Bajo. Hari ini, di Labuan Bajo hanya terdapat satu institusi perguruan tinggi, yakni kampus Politeknik El Bajo Commodus. Keberadaan kampus ini bertujuan untuk memproduksi output yang siap untuk bertarung dalam industri pariwisata di Manggarai Barat. Karena itu, kurikulum pengajarannya diarahkan untuk lebih mengutamakan pengajaran praksis daripada politis-teoretis agar bisa, dalam bahasa dosen Politeknik El Bajo Commodus, Fitri Cipto, “bertempur dengan pengusaha yang lain”, yakni para investor yang berasal dari luar Manggarai Barat.⁵⁴ Karena fokus pada kebutuhan praktis ini, kampus El Bajo Commodus mengabaikan soal ketimpangan relasi sosial ekonomi pembangunan pariwisata di Manggarai Barat, yang harusnya juga menjadi fokus advokasi dunia akademisi. Namun, hal itu tidak dilakukan karena antara lain ada semacam ketakutan seperti yang terungkap dari jawaban Fitri Cipto, dosen Politeknik El Bajo Commodus sebagai berikut: “Lembaga pendidikan ini masih baru dan masih sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan atas sebuah polemik yang terjadi di tengah masyarakat. [Karena itu, lembaga ini] [l]ebih banyak mengambil posisi netral ketika menghadapi sebuah persoalan dalam ruang publik.”⁵⁵ Akibatnya, gerakan politis dan diskursus kritis terhadap persoalan pembangunan di Manggarai Barat tidak pernah diproduksi di kampus ini oleh para mahasiswa dan staf pengajarnya.

Sementara itu, menurut Sil Joni, “intelektual dari pihak Gereja Katolik juga sulit untuk tumbuh sebagai akibat dari kedekatan Gereja Katolik dengan kapital dan negara akhir-akhir ini.”⁵⁶ Karena itu, Sil Joni menamai kenyataan ini sebagai “krisis intelektual”, baik intelektual kampus maupun intelektual Gereja Katolik, di tengah ketimpangan ekonomi politik dan krisis lingkungan di Manggarai Barat. Apalagi, menurutnya, di tengah ketimpangan ekonomi politik sebagai akibat pembangunan industri pariwisata, kaum intelektual di Manggarai Barat hanya berteriak ketika “mereka lapar,” tetapi akan diam jika sudah diberi insentif tertentu oleh modal dan kekuasaan.

LSM di Labuan Bajo banyak yang berkarakter oportunistik dan bermental ‘proyek.’ Di tengah kesenjangan ekonomi yang semakin menganga akibat pembangunan pariwisata, LSM di Manggarai Barat juga berorientasi mengejar kapital. Kemiskinan di Manggarai Barat, menurut Sil Joni, “justru menjadi komoditas untuk diperdagangkan oleh LSM kepada lembaga donatur.”⁵⁷ Karena itu, advokasi yang mereka lakukan bersifat ‘proyek’ dan sporadis. Mereka jarang bergabung dengan *civil society* yang lain untuk bisa mengorganisir sebuah gerakan perlawanan yang masif dan progresif. Menurut Sil Joni, “[j]ustru LSM yang sengaja memelihara kemiskinan di Manggarai Barat. Sebab, semakin banyak LSM, semakin miskin sebuah daerah, termasuk Manggarai Barat.”⁵⁸

⁵³Emilianus Yakob Sese Tolo, “Akumulasi Melalui Perampasan Dan Kemiskinan Di Flores.”

⁵⁴ Wawancara di Labuan Bajo pada 24 Juni 2021.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Gereja Katolik sebagai salah satu institusi besar yang bisa memainkan peran oposisi-profetisnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Sejauh ini Gereja Katolik memang didengarkan suaranya oleh pemerintah daerah. Pendapat Gereja Katolik sering didengar walaupun tidak semuanya diikuti oleh pemerintah. Gereja Katolik memang sangat getol melawan pertambangan dan industri pariwisata yang merusak alam. Sebab, Gereja Katolik berpedoman pada keyakinan, seperti yang disampaikan oleh Romo Ardi Obot, bahwa “gereja memperkuat umat dan rakyat secara keseluruhan dengan mendukung tindakan keselarasan keutuhan ciptaan. Pariwisata tidak boleh mengganggu keindahan alam. Lalu nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan alam ciptaan harus dijaga dengan baik.”⁵⁹ Karena itu, Gereja Katolik selalu “menyerukan keselarasan alam, kebersihan dan keindahan lingkungan serta menjaga keutuhan ciptaan. Gereja Katolik juga “sangat [getol] menolak penguasaan lahan masyarakat oleh orang-orang tertentu. Gereja selalu memihak rakyat dengan memperjuangkan ruang publik seperti Pantai Pede.”⁶⁰

Walaupun Gereja Katolik sudah melakukan perlawanan terhadap kapital seperti yang sudah dijelaskan ini, ia memiliki keterbatasan material dan struktural sendiri. Keterbatasan itu adalah bahwa Gereja Katolik sendiri memiliki aset ekonomi, terutama tanah, yang cukup besar di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo. Selain tanah, Gereja Katolik juga terlibat dalam industri pariwisata di Labuan Bajo. Misalnya, selain Keuskupan Ruteng memiliki aset tanah di Labuan Bajo, Keuskupan Denpasar juga memiliki tanah yang cukup luas di daerah yang cukup strategis ke arah Bukit Silvia, Labuan Bajo. Selain itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dalam kerjasamanya dengan *Marriott International* memiliki sebuah resort mewah di Labuan Bajo yang bernama *The Luxury Collection Labuan Bajo Resort*. Sebagai penguasa aset dan pelaku dalam bisnis pariwisata yang tentunya bergerak sesuai dengan logika neoliberal agar tetap bertahan dalam persaingan bisnis, jika Gereja Katolik ingin bersikap progresif-profetis, maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah melawan institusinya sendiri. Hal ini agak sulit dilakukan dan, karena itu, gerakan resistensi yang progresif tidak mungkin bisa datang dari Gereja Katolik. Gereja Katolik kelihatan lebih lantang melawan ekspansi industri tambang di Manggarai Barat, sektor di mana Gereja Katolik tidak berinvestasi, daripada pada ekspansi industri pariwisata di mana ia turut berinvestasi di dalamnya. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Sil Joni, “Gereja Katolik hanya menyerukan seruan moral melalui mimbar kotbah dan jarang berdiri di barisan depan membela kebutuhan masyarakat lokal di Manggarai Barat.”⁶¹

Karena elemen *civil society*, yang seharusnya melakukan gerakan perlawanan yang progresif, sistematis, dan berkelanjutan, tidak hadir di Manggarai Barat, maka gerakan perlawanan di Manggarai Barat bersifat involutif. Ia bersifat involutif dalam artian bahwa ia berada dalam transisi abadi, yang Kleden sebut sebagai “perubahan bentuk tanpa pembaruan substansinya.”⁶² Sebab, walaupun terdapat “gerakan perlawanan spontan” terhadap kapital dan negara di Manggarai Barat, gerakan itu tidak mampu ditransformasi menjadi sebuah gerakan ekonomi politik yang progresif, terorganisir, dan masif. Namun, dengan semakin menganganya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo, maka bukan tidak mungkin gerakan perlawanan ekonomi

⁵⁹ Wawancara di Labuan Bajo pada 24 Juni 2021.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara di Labuan Bajo pada 24 Juni 2024.

⁶² I. Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3S, 1987), hlm. 192.

politik itu akan muncul di masa depan. Namun, gerakan ekonomi politik yang progresif, terorganisir, dan masif hanya mungkin terjadi bila ada organisasi massa rakyat pekerja yang kuat.

Penutup

Artikel ini sudah menjelaskan bahwa negara neoliberal Indonesia membentuk pembangunan pariwisata di Manggarai Barat secara sentralistik. Pembangunan sentralistik ini ditunjukkan oleh sentralisasi kebijakan pembangunan pariwisata di kabupaten tersebut, yang dilakukan mulai dari rencana alokasi anggaran, rencana tata ruang, pemberian izin, penempatan wakil pusat di daerah, sampai pada akumulasi keuntungan pariwisata. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator semua ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Akibatnya, hal ini telah menimbulkan friksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terhadap wakil pusat yang ditempatkan di Manggarai Barat, seperti BPO dan BTNK. Selain itu, kebijakan seperti ini juga telah menyebabkan penyingkiran terhadap pemerintah daerah dan masyarakat lokal dari sumber pendapatan dan keuntungan dari pembangunan pariwisata di Manggarai Barat. Dengan sentralisasi kebijakan itu, kebijakan pariwisata negara neoliberal Indonesia berpihak kepada kapital, yang dianggap bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan itu membuat negara neoliberal tidak terlalu peduli dengan keadaan dan kondisi buruh pariwisata, warga lokal, dan pelaku pariwisata lokal. Keberpihakan yang menekankan kapital secara berlebihan dan akibat dari kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pembangunan pariwisata negara neoliberal cenderung tersandung kasus korupsi. Karena itu, pembangunan pariwisata ala negara neoliberal Indonesia di Manggarai Barat telah menghasilkan kemiskinan, polusi atau kerusakan lingkungan, dan kesenjangan ekonomi. Sayangnya, gerakan perlawanan *civil society* di Manggarai Barat belum tumbuh dan berkembang secara sistematis untuk menyikapi perubahan lanskap ekonomi dan sosial akibat pembangunan pariwisata ala negara neoliberal Indonesia. Akhirnya, di tengah situasi yang demikian, penelitian ini merekomendasikan dua hal. *Pertama*, penelitian ini merekomendasikan perlu diusahakannya sebuah pembangunan pariwisata yang desentralistik berdasarkan sinergitas yang seimbang antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sinergitas ini harus bertujuan untuk menciptakan pembangunan pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan. Model pembangunan seperti ini mengakomodasi semua sektor yang terkait, seperti pertanian, perikanan, pendidikan, dan koperasi dalam upaya pembangunan pariwisata. *Kedua*, selain itu, penelitian ini memang menjelaskan tentang bagaimana proses dan mekanisme kemiskinan pada skala makro, yang menekankan relasi antara negara neoliberal, pemerintah daerah, dan investor, dan, karena itu, kurang menyentuh proses dan mekanisme pembentukan kemiskinan pada skala mikro sebagai akibat dari relasi kelas sosial dalam masyarakat Manggarai Barat. Karena itu, penelitian tentang hal ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh peneliti lain di masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Bimas Katolik dan LPPM STFK Ledalero, yang telah membiayai penelitian ini yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai 27 Juni 2021 di Labuan Bajo. Penulis juga berterima kasih kepada asisten lokal Jean Loustar Jewadut S.Fil. dan Ignatius Rudi Haryanto S.Fil, yang sudah secara efektif menggumpulkan data di lapangan. Dua asisten lokal yang lain (Antonius Octaviano Susabun S. Fil. dan Daniel Abdineri Ngabut S.Fil.) tetap mendapatkan apresiasi dari penulis walaupun tidak efektif menggumpulkan data di lapangan.

Daftar Rujukan

- Bernstein, H. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Canada: Fernwood Publishing, 2010.
- Budiman, A. *Teori Negara: Negara Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Dale, C.J.P. *Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik*. Kupang: Sunspirit Books, 2013.
- De Vos, R., Köhne, M., & Roth, D. “We’ll turn your water into Coca-Cola”: The atomizing practices of oil palm plantation development in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 18(2), 2018.
- Erb, M. “Tourism As Glitter Re-Examining Domestic Tourism in Indonesia,” dalam Winter, Tim dan Teo, Peggy, Chang, T.C. (Eds.), *Asia On Tour: Exploring The Rise Of Asian Tourism*, New York: Routledge, 2009.
- _____. “Shaping A ‘New Manggarai’: Struggles Over Culture And Tradition In An Eastern Indonesian Regency.” *Asia Pacific Viewpoint*, 46 (3), 2005.
- _____. “Limiting Tourism And The Limits Of Tourism: The Production And Consumption Of Tourist Attractions in Western Flores.” *Indigenous Tourism: The Commodification And Management Of Culture*, 2005.
- _____. “Understanding Tourists: Interpretations From Indonesia”. *Annals Of Tourism Research*, 27(3), 2000.
- Fortin, C.J. “The Biofuel Boom and Indonesia’s Oil Palm Industry: The Twin Processes of Peasant Dispossession and Adverse Incorporation in West Kalimantan.” Makalah ini dipresentasikan pada *the International Conference on Global Land Grabbing*, University of Sussex, UK 6-8 April, 2011.
- Gramsci, A. *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher, 1971.
- Habibi, M. “Capitalist Agrarian Change in Indonesia: Class, Production and Reproduction.” Disertasi PhD, Development Studies, SOAS University of London, 2020.
- Hall, D. “Primitive accumulation, accumulation by dispossession and the global land grab”. *Third World Quarterly*, 34(9), 2013.
- Hanieh, A. “Thinking About Capital and Class In The Gulf Arab States,” in Alessandra Mezzadri, ed. *Marx In The Field*. New York: Anthem Press, 2021.
- Harvey, D. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Harvey, D. *A brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press, 2005.
- McCarthy, J. F., Vel, J. A., & Afiff, S. “Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands”. *Journal of Peasant Studies*, 39(2), 2012.

- McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. "Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers". *Geographical Journal*, 175(2), 2009.
- Mufarida, Binti. "Wisata Labuan Bajo Berpotensi Menurunkan Kemiskinan." *SindoNews*, 26 Desember 2019. <https://nasional.sindonews.com/berita/1480057/15/wisata-labuan-bajo-berpotensi-turunkan-kemiskinan>. Diakses 5 Mei 2021.
- Kleden, I. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3S, 1987.
- Klinken, Gerry Van. *The Making Of Middle Indonesia: Kelas Menengah Di Kota Kupang, 1930an-1980an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Dan Kitlv-Jakarta, 2015.
- Picard, M. "Cultural Tourism, Nation-Building And Regional Culture: The Making Of A Balinese Identity," in M. Picard & R. E. Wood, eds. *Tourism, Ethnicity And The State In Asian And Pacific Societies*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 1997.
- Peluso, N. L., and Lund, C. "New frontiers of land control: Introduction." *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 2011.
- Pincus, J. "Approaches to the political economy of agrarian change in Java." *Journal of Contemporary Asia*, 20 (1), 1990.
- Ramayudhianty, P. "Wisata Labuan Bajo Berpotensi Turunkan Angka Kemiskinan." <https://kemensos.go.id/wisata-labuan-bajo-berpotensi-turunkan-angka-kemiskinan>. Diakses 6 Desember 2021.
- Tapsell, R. *Kuasa Media di Indonesia, Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital*. Jakarta: Marjin Kiri, 2018.
- Thoha, M. "Tinjauan Dan Implementasi Birokrasi Di Indonesia". *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(3), 2020.
- Tolo, E.Y.S. "Akumulasi Melalui Perampasan Dan Kemiskinan Di Flores. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 2016.
- _____. "Weighing Jokowi's Infrastructure Projects in Eastern Indonesia." <https://www.newmandala.org/weighing-jokowis-infrastructure-projects-ineastern-indonesia/>. Diakses 11 Oktober 2019
- _____. "Proyek Infrastruktur di Flores: Hanya Memakmurkan yang Kaya?". <https://tirto.id/proyek-infrastruktur-di-flores-hanya-memakmurkan-yangkaya-dhsG>). Diakses 11 Oktober 2019.
- Winter, Jeffrey A. "Oligarchy and Democracy in Indonesia". *Indonesia* 96, 2013.
- Zhang, Q. F. "Class differentiation in rural China: Dynamics of accumulation, commodification and state intervention". *Journal of Agrarian Change*, 15(3), 2015.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD di Labuan Bajo pada 25 Juni 2021.

Wawancara

Ardi Obot, rohaniwan Katolik, Labuan Bajo, 24 Juni 2021.

Marsel Jeramun, wakil ketua DPRD Manggarai Barat, Labuan Bajo, 22 Juni 2021.

Mateus Ngabut, kepala dinas Pemberdayaan Desa Manggarai Barat, Labuan Bajo, 23 Juni 2021.

Sil Joni, pemerhati masalah sosial, Labuan Bajo, 24 Juni 2021.